

PENGAWASAN KINERJA PEGAWAI DI PERUSAHAAN DAERAH

RUMAH POTONG HEWAN KOTA MAKASSAR

NURMAYANTI

Nomor Stambuk : 10561 05064 14



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

**PENGAWASAN KINERJA PEGAWAI DI PERUSAHAAN DAERAH
RUMAH POTONG HEWAN KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

NURMAYANTI

Nomor Stambuk : 10561 05064 14

KEPADA

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Pengawasan Kinerja Pegawai Diperusahaan
Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Nurmayanti

Nomor Stambuk : 10561 05064 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

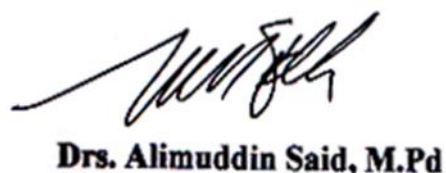
Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Abdul Mahsyar, M.Si

Pembimbing II



Drs. Alimuddin Said, M.Pd

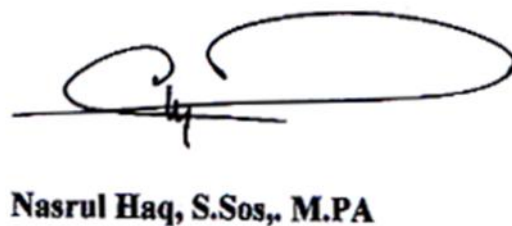
Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihsani Malik, S. Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

PENERIMAAN TIM

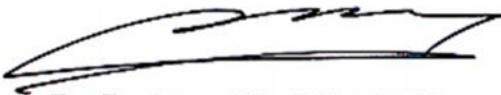
Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1200/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai saah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Selasa tanggal 21 bulan Agustus tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua,


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris,


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Dr. Djaelan Usman, M.Si (ketua)
2. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH., MH
3. Drs. Alimuddin Said, M.Pd
4. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si

()
()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurmayanti

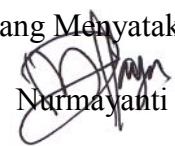
Nomor Stambuk : 10561 05064 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Mei 2018

Yang Menyatakan,


Nurmayanti

ABSTRAK

NURMAYANTI. Pengawasan Kinerja Pegawai Diperusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar (dibimbing oleh Abdul Mahsyar dan Alimuddin Said).

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan pegawai perusahaan daerah rumah potong hewan kota Makassar dalam mengelola rumah potong hewan dikota Makassar. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 1 bulan dan berlokasi di perusahaan daerah rumah potong hewan kota makassar kompleks RPH Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer berupa wawancara dan sekunder berupa dokumen, buku, catatan, laporan, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan kurang dan tidak maksimalnya kinerja pegawai pada perusahaan daerah rumah potong hewan Kota Makassar dalam melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap hewan-hewan yang akan dipotong pada rumah potong hewan (RPH). Pegawai dianggap kurang dalam melakukan pengawasan baik pada pengawasan langsung maupun tidak langsung, pegawai diperusahaan daerah rumah potong hewan sangat malas datang ke kantor. kinerja pegawai dalam melakukan pengawasan juga belum maksimal, hal ini karena masih banyak ditemui hewan betina produktif yang lolos potong, juga masih banyak ditemui hewan sakit lolos potong, kebersihan dan kehiegenisan juga tidak terdapat pada rumah potong hewan bau menyengat tercium sampai pada pemukiman penduduk.

Kata Kunci : Pengawasan, Kinerja, Pegawai.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengawasan Kinerja Pegawai Diperusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politi Universitas Muhammadiyah Makassar.

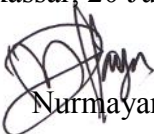
Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kepada Bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Alimuddin Said, M.Pd selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos,M.Ap selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat dijadikan sebagai bekal dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh pegawai yang ada diperusahaan daerah rumah potong hewan Kota Makassar yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Kedua Orang tua Abdul Kadir dan Nurhaedah serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil, kepada kedua adik tercinta M.Ichasan Nur dan Nur Azizah.
7. Teman terbaik yang selalu menyemangati dan memberikan bantuan juga doa Partini Hasim dan Yusria Palimeri Andika

8. Geng the power of bacrit yang didalamnya terdapat saudara tak sedarah yang selalu menjengkelkan (Qalby, Jihang, Asri, Fadel, Acci, Caha, dan Ucup)
9. Geng wanita idaman mertua (Dita Oljen, Haser, dan Tiara)
10. Geng Cecan Squad yang menjadi saksi bisu dalam sepak terjang perjuangan kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar (Irna, Mita, Yum, Isni, Diva)
11. Teman seperjuangan Kelas F Jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 14 yang telah memberikan warna, saling menguatkan dan memberi motivasi untuk mencapai gelar sarjana
12. Teman KKP ke XV Desa Lassang Barat (Dewi yang selalu menemani pergi kencing, Munaroh teman makan, Wulan teman duet, Ewin dan Saida sipenakut) dan Staf Kantor terima kasih telah menjadi keluarga baru bagi penulis
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terima kasih atas do'a dan dukungan kalian.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 20 Juni 2018


Nurmhayanti

DAFTAR ISI

Halaman pengajuan skripsi	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian, Konsep dan Teori	9
1. Pengertian pengawasan.....	9
2. Pengawasan langsung dan tidak langsung	13
3. Fungsi pengawasan	14
4. Karakteristik pengawasan	14
5. Tujuan dan manfaat pengawasan	14
6. Proses dan cara-cara pengawasan	16
7. Factor pentingnya pengawasan	18
8. Sifat dan waktu pengawasan	18
9. Macam-macam pengawasan	20
10. Pengertian Kinerja	25
11. Perusahaan daerah rumah potong hewan Kota Makassar	28
B. Kerangka Pikir.....	31
C. Fokus Penelitian	33
BAB III. METODE PENELITIAN.....	35
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	35

B. Jenis dan Tipe Penelitian	35
C. Sumber Data	36
D. Informan Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Keabsahan Data.....	39
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	41
1. Gambaran Umum Kota Makassar	41
2. Gambaran Umum Kondisi perusda RPH Kota Makassar	44
3. Letak Wilayah	46
4. Visi, Misi.....	47
5. Tujuan dan sasaran	44
6. Aspek Regulasi	50
7. Kondisi umum RPH	51
B. Hasil Penelitian Pengawasan Kinerja Pegawai Diperusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar	56
1. Pengawasan langsung.....	60
2. Pengawasan tidak langsung.....	71
BAB V. PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

A. Tabel Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	37
B. Tabel 4.1 luas wilayah kota Makassar menurut kecamatan	42
C. Tabel 4.2 standar tujuan perusda RPH kota Makassar	49
D. Tabel 4.3 rencana strategis RPH kota Makassar	54
E. Tabel 4.4 pengusaha potong perusda RPH kota Makassar	55
F. Tabel 4.5 badan pengawasan diperusda RPH kota Makassar	61
G. Tabel 4.5 hewan yang dipotong di RPH kota Makassar	64

DAFTAR GAMBAR

A. Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir.....	37
---	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan birokrasi adalah manajemen untuk sumber daya manusia atau aparatur. Didalam manajemen terdapat fungsi-fungsi agar semua pekerjaan yang dilakukan dalam semua pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu fungsi manajemen adalah pengawasan. Pengawasan memiliki peranan yang penting dalam menentukan suatu pencapaian tujuan. Pengawasan dapat dikatakan mutlak dan sangat perlu karena pada dasarnya manusia bersifat salah dan paling sedikit bersifat khilaf. Pengawasan sendiri masuk dalam fungsi-fungsi manajemen agar semua pekerjaan yang dilakukan dalam semua pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya pengawasan penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan, keuangan, dan kedudukan tidak akan terjadi. Pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam rencana.

Pelaksanaan pengawasan yang optimal dan dilakukan secara berkala akan memberikan efek positif terhadap kinerja pegawai. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya akan lebih membangkitkan motivasi dan keseriusan pegawai saat bekerja sehingga dapat memperbesar peluang dari instansi pemerintah untuk mencapai target yang ada karena memiliki pegawai

berkinerja tinggi, mengingat kunci keberhasilan pelaksanaan suatu program akan bergantung kepada kinerja pegawainya. Tanpa adanya proses pengawasan akan menyebabkan hancurnya suatu organisasi cepat atau lambat. Savas (1987:62) mengemukakan bahwa pada sektor terminologi didalam pelayanan pemerintah di artikan sebagai pemberian pelayanan dari agen pemerintah melalui pegawainya (Waluyo 2007:127).

Pentingnya pengawasan untuk mengamati dan menjamin semua pekerjaan yang sedang dilakukan dalam seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi agar berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan ini pengawasan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya proses pelaksanaan pengawasan harus efisien. Agar para pelaksana dapat meningkatkan kemampuannya lebih maksimal lagi dalam melakukan tugas yang diberikan kepadanya pengawasan harus bersifat membimbing. Dalam setiap pengawasan kegiatan atau pekerjaan dalam prakteknya terdapat tata cara, Teknik-teknik pengawasan yang efektif, dan suatu metode.

Pengawasan mempunyai dua macam Teknik yaitu: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Dimana yang dimaksud dengan pengawasan langsung yaitu apabila seorang pimpinan dalam organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

Pengawasan langsung itu apabila seorang pimpinan dalam organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya, pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung, on-the-spot observation, dan on-the-spot report Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan tersebut bias saja dapat berbentuk: tertulis, dan lisan. Pengawasan langsung berkaitan dengan kegiatan membandingkan standar yang telah ditetapkan dengan hasil nyata yang telah dicapai. Sarwanto (2010) mendefinisikan Pengawasan mengusahakan agar pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan hasil yang dikehendaki itu tugas manajer. Pengawasan merupakan keseluruhan pelaksanaan kegiatan perusahaan atau organisasi bertujuan untuk menjamin keseluruhan pekerjaan yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, siagian (2008).

Dalam pengawasan memiliki komponen atau dimensi, yaitu dimensi menetapkan standar (standars), pengukuran (measurement), membandingkan (compare), melakukan tindakan (action). Dalam konteks menetapkan standar yaitu menetapkan target (patokan) dan hasil yang diinginkan, sedangkan dalam konteks pengukuran yaitu suatu bentuk pengukuran harian, mingguan, dan bulanan yang prosesnya dilakukan berulang-ulang dengan benar dan terus-menerus. Dan dalam konteks membandingkan yaitu didalamnya membandingkan standar yang sudah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai, Dalam konteks action (melakukan

tindakan) disini pengawasan mengalami perbaikan jika didalam pengawasan terdapat penyimpangan. (satriadi:2016).

Pengawasan kinerja pegawai pada dasarnya merupakan salah satu unsur yang penting dalam perusahaan, pengawasan menjadi sumber daya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dalam perusahaan. Pengawasan yang optimal merupakan merupakan salah satu tujuan organisasi dalam pencapaian kerja yang maksimal. Pengawasan sangat penting dilakukan dalam sebuah perusahaan karena merupakan tolak ukur mengenai tingkat keberhasilan kinerja seorang pegawai dalam melaksanakan dan menjalankan tanggung jawab yang diberikan (Chaterina Melina Taurisa: 2012).

Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung sangat diperlukan. salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang maksimal dan tercapainya tujuan suatu organisasi publik atau instansi pemerintah adalah melalui pengawasan baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan merupakan kegiatan pemimpin dalam organisasi yang mengusahakan agar tugas-tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang diinginkan. Pengawasan adalah suatu proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan merupakan salah satu unsur terpenting dalam manajemen, dengan adanya pengawasan setiap perusahaan akan mendapatkan pegawai yang memberikan prestasi kerja seperti pada perusahaan badan usaha milik negara yang sekarang ini

sebagai salah satu yang berperan penting dalam perekonomian di Indonesia Earl P. strong (Syamsul Ridjal 2009).

Perusahaan daerah rumah potong hewan masih belum memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 2006, sebagaimana dikatakan Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan. bereksistensi dalam bidang penyediaan daging yang pengelolannya masuk sampai ke seluruh daerah dikota makassar. Untuk mencukupi kebutuhan konsumennya perusahaan rumah potong hewan (RPH) ini selalu meningkatkan kualitas produksi daging setiap harinya. Salah satu tahap yang sangat menentukan kualitas dan keamanan daging dalam mata rantai penyediaan daging adalah tahap di rumah pemotongan hewan (RPH). Rumah potong hewan sendiri adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas (Manual Kesmavet:1993).

Dalam menghasilkan daging yang berkualitas perlu pengelolaan yang baik dari perusahaan daerah rumah potong hewan terhadap rumah potong hewan yang menjadi pusat pemotongan hewan, RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal dan dengan pengawasan kinerja pegawai yang baik akan menghasilkan perusahaan yang berkualitas. seperti pada perusahaan daerah rumah potong hewan kota makassar yang merupakan satu-satunya rumah potong hewan yang ada dikota makassar.

Jumlah hewan yang dipotong yang dilakukan di rumah potong hewan Kota Makassar terjadi peningkatan setiap tahun, (Zulkifly Asdar:2014).

Peningkatan setiap tahun tersebut rumah potong hewan Makassar haruslah dikelola dengan baik. Sebagaimana kondisi RPH sekarang tidak lagi terlihat terawat malah terlihat jorok dan tidak higienis. Pengawasan langsung terhadap hewan sebelum dan sesudah dipotong tidak pernah dilakukan. Selain itu bangunannya yang tidak layak lagi, pengawasan langsung pada kesehatan hewan oleh para pegawai RPH tidak maksimal seperti sebagian hewan sakit masih lolos potong, para pegawai juga sangat kurang pengawasan terhadap pengolahan limbah dari kotoran hewan yang telah dipotong seperti sekarang ini telah menumpuk dan menghasilkan bau menyengat yang tercium sampai di dekat lokasi pemukiman penduduk selain itu ada banyak hewan betina produktif yang lolos potong (beritakotamakassar.com). Para pegawai pada perusda RPH Kota Makassar sangat jarang masuk kantor mereka datang hanya absen lalu pulang. Oleh karena itu maka perlu adanya pengawasan yang dilakukan pegawai perusahaan daerah di rumah potong hewan tersebut dengan menggunakan teori Henry Fayol yang mengatakan terdapat dua macam Teknik pengawasan yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka Penulis tertarik melakukan penelitian Sehingga penulis mengangkat judul **“Pengawasan Kinerja Pegawai di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat disusun rumusan masalah:

1. Bagaimana pengawasan langsung kinerja pegawai di perusahaan daerah Rumah potong hewan Kota Makassar ?
2. Bagaimana pengawasan tidak langsung kinerja pegawai di perusahaan daerah Rumah potong hewan Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan langsung kinerja pegawai perusahaan daerah Rumah potong hewan terhadap rumah potong hewan Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan tidak langsung kinerja pegawai perusahaan daerah Rumah potong hewan terhadap rumah potong hewan Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung di dalam Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Di Rumah Potong Hewan (RPH) kota Makassar.

2. Sebagai kajian dan bahan informasi kepada semua pihak yang memiliki dalam perusahaan daerah rumah potong hewan kota Makassar

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah hal yang sangat penting untuk setiap pekerjaan dalam suatu organisasi, karena dengan melalui pengawasan kita bisa memantau berbagai hal yang akan merugikan organisasi, seperti kesalahan-kesalahan dalam setiap pelaksanaan pekerjaan, kekurangan-kekurangan dan juga kelemahan pelaksanaan tata cara kerja, serta rintangan-rintangan yang dialami. Pada dasarnya pengawasan diartikan sebagai pengamatan dan pengukuran terhadap suatu kegiatan dan hasil yang ingin dicapai dibandingkan sasaran atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya, (Brantas 2009).

The Liang Gie (dalam Satriadi:2006) mengartikan pengawasan sebagai suatu proses pengamatan dari keseluruhan kegiatan dalam organisasi yang mempunyai tujuan menjamin agar keseluruhan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan sebelumnya.

Kemudian Earl P. Strong (Brantas 2009:189), pengawasan dimaksudkan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana

Begitu juga dengan Harold Koontz (Brantas 2009:189), mengatakan pengawasan adalah perbaikan dan pengukuran terhadap pelaksanaan kerja bawahan, untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terlaksana.

Demikian dengan pengertian pengawasan selanjutnya yang merupakan sebuah usaha untuk menciptakan adanya kecocokan antara yang ditugaskan atau penyelenggara tugas pemerintah pusat atau daerah dan dengan meyakinkan dan menjamin kelancaran pelaksanaan pemerintah dengan mempunyai daya guna, Makeuda (dalam Jaka Winarna Sri Murni :2006).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas peneliti menggunakan teori dari Henry Fayol (dalam Sondang p. Siagian, 2003:115).yang mengatakan proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua macam Teknik pengawasan adapun Teknik pengawasn itu sebagai berikut:

Teknik-teknik pengawasan

1. pengawasan langsung

Dimana yang dimaksud dengan pengawasan langsung yaitu apabila seorang pimpinan dalam organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya. Pengawasan langsung ini biasa berbentuk seperti:

- a. direct inspection atau inspeksi langsung yaitu peninjauan secara pribadi, mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.

- b. *on-the-spot observation* merupakan pengawasan langsung di tempat pengamatan untuk melihat sendiri bagaimana cara petugas operasional dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan tugasnya
- c. *on-the-spot report* merupakan pengawasan pada laporan yang diberikan oleh bawahan secara langsung atas hasil pekerjaannya

berarti sekaligus dalam suatu pengambilan keputusan *on-the-spot* pula jika perlu. Akan tetapi dikarenakan banyak dan kompleksnya tugas-tugas seseorang pimpinan terutama dalam sebuah organisasi yang besar dimana seorang pemimpin sangat tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat secara tidak langsung. Adapun pengawasan tidak langsung itu

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dimaksudkan adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan tersebut bias saja dapat berbentuk:

- a. tertulis, dan
- b. lisan

akan tetapi pengawasan langsung ini juga memiliki kelemahan, kelemahan dari pengawasan tidak langsung itu adalah sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif atau yang benar saja. Dengan kata lain para bawahan ini

mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang akan menyenangkan seorang pimpinan.

Padahal, seharusnya seorang pimpinan yang baik akan menuntut bawahannya untuk bertanggung jawab dalam melaporkan hal-hal baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Oleh Sebabnya ialah bahwa jika hanya hal-hal positif saja yang dilaporkan, pimpinan tidak akan mengetahui keadaan yang sesungguhnya dan kenyataan yang terjadi. Hal ini akan berakibat pimpinan akan mengambil keputusan yang salah.

Namun demikian kiranya perlu ditekankan juga bahwa bawahan terkadang sering hanya melaporkan hal-hal yang positif saja karena akibat sifat pimpinan yang suka menghukum orang-orang yang melaporkan hal-hal yang bersifat negatif dan memaksa orang-orang memberikan laporan yang baik. Untuk memberikan gambaran yang tepat dan untuk mempunyai perspektif yang objektif, pemimpin sering saja lebih perlu mengetahui hal-hal negatif, terutama kegagalan-kegagalan yang dihadapi serta masalah-masalah yang belum sempat dipecahkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila seorang pimpinan hanya bergantung kepada laporan saja. Karenanya pengawasan tidak langsung saja belum cukup. Seorang pemimpin sangat bijaksana apabila pimpinan organisasi menggabungkan teknik pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melakukan fungsi pengawasan itu dalam sebuah organisasi.

2. Dimensi- dimensi pengawasan

Agar pengawasan dapat terlaksana dengan baik terdapat beberapa dimensi-dimensi pengawasan yang perlu dimengerti dan dipahami terlebih dahulu, menurut Robbins and Coulter terdapat empat dimensi-dimensi pengawasan yaitu:

Robbins and Coulter (satriadi :2016) mengemukakan dimensi pengawasan terdiri dari 4 dimensi yaitu: menetapkan standar (standars), pengukuran (measurement), membandingkan (compare), melakukan tindakan (action). Dalam konteks menetapkan standar yaitu menetapkan target (patokan) dan hasil yang diinginkan, sedangkan dalam konteks pengukuran yaitu suatu bentuk pengukuran harian, mingguan, dan bulanan yang prosesnya dilakukan berulang-ulang dengan benar dan terus-menerus. Dan dalam konteks membandingkan yaitu didalamnya membandingkan standar yang sudah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai, Dalam konteks action (melakukan tindakan) disini pengawasan mengalami perbaikan jika didalam pengawasan terdapat penyimpangan.

Pada sumber lain mengatakan dimensi-dimensi pengawasan terbagi 5 dimensi

- a. Dimensi penetapan standar hasil yang diingin ditentukan
- b. Dimensi penentuan ukuran dari pelaksanaan kegiatan
- c. Dimensi pelaksanaan kegiatan yang telah diukur
- d. Dimensi membandingkan pelaksanaan dengan standar dan Analisa penyimpangan-penyimpangan, dan
- e. Dimensi mengambil tindakan korektif jika diperlukan atau dibutuhkan, (dalam Satriadi:2016).

3. Fungsi pengawasan

Pengawasan pada dasarnya merupakan tindak lanjut. Pengawasan adalah suatu proses mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Penentuan yang akan dicapai atau dituju oleh organisasi itu sendiri.
2. Penentuan yang harus dipegang sebagai suatu pedoman salah satunya standar.
3. Menelaah yang sedang diperbuat atau telah saat ini dan penganalisisannya lebih lanjut.
4. Penentuan tindakan apa yang harus diambil sebagai suatu langkah pembenaran jika dalam kegiatan ternyata tidak sesuai dari rencana yang telah ditetapkan (Wijayanti 2008:36).

4. Karakteristik pengawasan yang efektif

Dalam melakukan pengawasan oleh suatu pimpinan perlu diketahui karakteristik yang efektif agar pengawasan dapat berjalan dengan maksimal, karakteristik pengawasan sebagai berikut:

- a. Akurat
- b. Tepat waktu
- c. Menyeluruh atau obyektif
- d. Terpusat pada satu titik-titik pengawasan yang strategik

5. Tujuan dan manfaat pengawasan

Berikut tujuan pengawasan, yaitu

- a. Agar proses dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari suatu rencana.

- b. Melakukan tindakan dari perbaikan (*corrective*), dan jika terdapat beberapa penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*)
- c. Agar tujuan yang dihasilkan berdasarkan dengan rencana.
- d. Menghentikan dan menghapuskan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, dan juga pemborosan, hambatan, terakhir ketidakadilan.
- e. Mencegah untuk terulangnya kembali suatu kesalahan, penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan, masalah, dan juga ketidakadilan.
- f. Mendapatkan cara yang lebih baik dalam melakukan pembinaan yang lebih baik.
- g. Membuat suasana keterbukaan, jujur, partisipasi, dan akuntabilitas dalam organisasi.
- h. Meningkatkan kelancaran operasi dalam suatu organisasi
- i. Meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi.
- j. Memberikan opini kepada kinerja organisasi.
- k. Memberikan arah kepada manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah dalam pencapaian kinerja.
- l. Menciptakan dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, (dalam Brantas 2009:190).

Sumber lain mengatakan bahwa fungsi pengawasan pada intinya merupakan suatu proses yang bertujuan apakah yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya, apakah ada faktor yang menghambat pada saat kegiatan berlangsung dan juga pengambilan keputusan saat dalam kegiatan tersebut ada yang menghambat, (Darnisa, Mukhlis Madani, Abdul Mahsyar: 2016). Pengawasan menyangkut dengan kegiatan memilah dan membandingkan suatu hasil yang telah dicapai dengan standar yang sudah ditetapkan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan pekerjaan pada saat pelaksanaan berlangsung sesuai atau tidak dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan manfaat pengawasan yaitu:

Manfaat pengawasan bermaksud untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Yang pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk meningkatkan langkah-langkah pembenahan atau koreksi yang objektif dan jika terjadi sebuah perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaannya. Dalam artian ini pengawasan juga dapat berarti mengarahkan atau mengkoordinasikan suatu kegiatan agar pemborosan sumber daya dapat terhindari (dalam Brantas 2009:191)

6. Proses dan cara-cara pengawasan

Proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut:

- a. Menentukan standar-standar yang akan dipergunakan pada dasar pengawasan.

- b. Mengukur suatu pelaksanaan pengawasan.
- c. Membandingkan dalam pelaksanaan sesuai dengan hasil, standar, dan menentukan penyimpangan jika terjadi.
- d. Melakukan tindakan jika terdapat perbaikan, dan jika terdapat penyimpangan agar dalam pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Sebuah rencana juga perlu dinilai dan dianalisis kembali, apakah rencana tersebut sudah benar-benar realistis atau tidak. Dan jika belum benar-benar realistis maka rencana itu perlu adanya perbaikan (dalam Brantas 2009:194).

Senada dengan pendapat diatas, menurut Effendi 2014 (dalam, Dessy nindya ningsih : 2017) proses dan tahap-tahapan pengawasan yaitu:

- a. Penetapan standar pelaksanaan: untuk penilaian hasil, sasaran dan tujuan standar digunakan untuk pengukuran, terdapat tiga bentuk standar yang digunakan yaitu: standar moneter, fisik, dan waktu.
- b. penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan: dalam hal ini penentuan pengukuran dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan pada apa pengukuran yang akan dilakukan, periode waktu berapa kali, dan siapa saja yang mempunyai keterlibatan dalam pengukuran.
- c. pengukuran pelaksanaan kegiatan: pengukuran ini dilakukan dengan berbagai cara secara terus menerus dan berulang-ulang dalam bentuk laporan-laporan, metode-metode otomatis, pengamatan dan pengujian dengan mengambil sampel.

- d. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan: ini bermaksud pelaksanaan yang sudah direncanakan dan hasil kemungkinan terdapat berbagai penyimpangan dilakukan perbandingan sehingga dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah tersebut.
- e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan: cara ini dapat dilakukan dan diperbaiki secara bersamaan mengenai bentuk standar dan pelaksanaan.

7. Faktor-faktor yang membuat pentingnya pengawasan

Pentingnya pengawasan didorong oleh berbagai faktor yaitu:

- a. perubahan lingkungan dalam suatu organisasi
- b. peningkatan kompleksitas
- c. kesalahan-kesalahan
- d. dan kebutuhan manajer dalam mendelegasikan wewenang (dalam wijayanti:118)

8. Sifat dan Waktu Pengawasan

sifat dan waktu pengawasan dibedakan atas:

- a. Preventive control, pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan dengan maksud saat dilaksanakan tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan preventive control ini adalah pengawasan yang terbaik karena pengawaasan ini dilakukan saat sebelum terjadi kesalahan.

Pengawasan preventive control ini dilakukan dengan cara:

- a. saat ditentukan proses pelaksanaan pekerjaan.
- b. membuat peraturan pelaksanaan pekerjaan.
- c. menjelaskan tata cara pelaksanaan kegiatan.
- d. mengorganisir semua macam kegiatan.
- e. Menentukan jabatan bagi setiap karyawan
- f. Menetapkan dan mengkoordinasi laporan dan pemeriksaan.
- g. Menetapkan sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran.
- h. Repressive control, adalah pengawasan yang dilakukan pada saat kesalahan telah terjadi saat kegiatan sudah berlangsung, pengawasan ini dimaksudkan agar tidak lagi terjadi kesalahan dan mendapatkan hasil sesuai dengan rencana. Pengawasan repressive control ini dilakukan dengan cara :
 - i. Membandingkan antara rencana dan hasil
 - j. Menganalisis Penyebab kesalahan terjadi dan mencari solusi untuk mengatasinya
 - k. Memberikan penilaian pelaksanaan
 - l. Meninjau kembali pelaksanaan prosedur yang ada
 - m. Mengecek laporan yang telah dibuat mengenai kebenaran laporan tersebut

- n. Meningkatkan kemampuan melalui training.
- o. Pengawasan saat proses kegiatan sedang dilakukan jika ditemukan kesalahan maka segera diperbaiki.
- p. Pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan perminggu, perbulan, persemester.
- q. Pengawasan mendadak, adalah pengawasan secara mendadak untuk mengetahui pelaksanaan dan aturan yang telah ditetapkan dilaksanakan atau tidak. Pengawasan ini perlu sekali-kali dilakukan agar karyawan dapat disiplin.
- r. Pengamatan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilakukan dari sebelum kegiatan dilaksanakan, pada saat kegiatan berlangsung dan sesudah kegiatan.

9. Macam-macam pengawasan

Pengawasan dikenal beberapa macam, yaitu pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan resmi, dan pengawasan konsumen.

- a. Pengawasan internal (internal control), adalah pengawasan yang mencakup hal-hal yang luas baik pada pelaksanaan prosedur kerja, tugas, kedisiplinan karyawan, dan lain-lain. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan ini berkaitan tentang kebenaran terhadap perusahaan.

- b. Pengawasan internal (external control), adalah Pengawasan yang dapat dilakukan secara formal maupun informal dan pengawasan ini dilakukan oleh orang luar.
- c. Pengawasan resmi (formal control), adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat resmi
- d. Pengawasan konsumen (informal control), adalah pengawasan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui masyarakat atau konsumen (brantas :2009).

Senada dengan pendapat diatas, terdapat pendapat lain mengenai jenis-jenis pengawasan menurut (dessy:2017) yaitu:

Pengawasan Preventif dan Represif

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan bersifat preventif adalah pengawasan yang menekankan pada pencegahan, jangan ada kesalahan dikemudian hari. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

2) Pengawasan Represif

Pengawasan yang bersifat refresif adalah memperbaiki kesalahan yang telah terjadi sehingga dikemudian hari jangan sampai terulang lagi. Dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

1) Pengawasan Intern.

Pengawasan dapat dikatakan intern jika antara pengawas dan yang diawasi mempunyai hierarkis atau masih dalam hubungan pekerjaan (dalam kelompok eksekutif sendiri).

2) Pengawasan Ekstern.

Pengawasan ekstern, terjadi jika antara pengawas dengan yang diawasi tidak mempunyai hubungan hierarkis atau berada diluar eksekutif. Pengawasan dilakukan oleh aparat dari luar organisai. Situmorang dan Juhir (1994:29-65), dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989, ditegaskan mengenai macam-macam pengawasan Adapun

macam-macam pengawasan menurut Instruksi Presiden tersebut yaitu :

a. Pengawasan Melekat (Waskat)

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.

c. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.

d. Pengawasan Legislatif

Pengawasan legislatif merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum jenis pengawasan dibedakan menjadi dua yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Selain itu, terdapat beberapa jenis pengawasan lain seperti pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, pengawasan preventif dan pengawasan represif, pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat dan pengawasan legislatif

10. Maksud dan tujuan pengawasan

Dalam proses pencapaian tujuan diperlukan Pengawasan yang mutlak, tujuan dari pengawasan tidak lain dari terwujudnya tujuan yang dikehendaki dalam organisasi.

Bohari 1992 (dalam, Dessy nindya ningsih : 2017) mengemukakan bahwa tujuan dari pengawasan yaitu membandingkan dan mengamati apa yang sebenarnya dan seharusnya terjadi, yang dengan maksud agar dapat diambil tindakan korektif secepatnya dengan melaporkan penyimpangan kepada pemimpin atau penanggung jawab fungsi. Tujuan utama lain dari pengawasan ialah memahami jika terjadi beberapa kesalahan demi perbaikan dimasa mendatang dan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dar suatu rencana dapat terarahkan sehingga mencapai hasil yang diharapkan dengan maksimal.

Sedangkan maksud dari pengawasan dengan mengutip pendapat dari Arifin Rachman (dalam, Dessy nindya ningsih : 2017) yaitu:

- a. Untuk mengadakan perubahan dalam memperbaiki serta mencegah terulangnya kesalahan yang sama, dan mengetahui kelemahan serta berbagai kesulitan-kesulitan
- b. Untuk mengetahui segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan
- c. Untuk mengetahui dalam suatu kegiatan sudah berjalan dengan prinsip dan sesuai instruksi yang sudahn ditetapkan

- d. Untuk mengetahui sudah tidak diadakannya atau masih diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga terefisien dengan benar.

Oleh karena itu, terlebih dalam negara berkembang merupakan hal yang sangat penting dilakukannya pengawasan dikarenakan pembangunan pada negara berkembang masih sangat pesat dilakukan dengan tenaga yang belum mapan atau siap mental dalam mengadakan pembangunan yang memungkinkan terjadinya kesalahan dan kecurangan-kecurangan.

11. Pengertian kinerja

Kinerja sangat sering dikaitkan dengan tingkat produktivitas yang menunjukkan antara input dan output dalam sebuah organisasi. Bahkan terlihat dari memberikan penekanan pada suatu nilai efisiensi yang bisa dikaitkan dengan kualitas output yang para pegawai hasilkan berdasarkan beberapa standar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi Gomes (dalam Syamsul Ridjal 2010)

Menurut Mangkunegara (dalam ummi masitahsari:2015), memberikan pengertian tentang kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas yang harus dicapai seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dan dipercayakan kepadanya

Senada dengan itu Moestopadidjaja (1996:2), juga menjelaskan bahwa kinerja merupakan sebuah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam usaha mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (dalam Syamsul Ridjal 2010:30).

Selanjutnya menurut Widyahartono kinerja merupakan penampakan seseorang dalam menghasilkan sesuatu yang bisa tercermin dari suatu hasil pekerjaannya (dalam Syamsul Ridjal 2010:30).

Senada dengan pendapat tersebut pengertian kinerja menurut Suyadi (1999), kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok masyarakat atau orang dalam melaksanakan tugas atau suatu pekerjaan sesuai standar, kriteria dan ukuran yang ditetapkan untuk pekerjaan itu.

Kemudian Rao (1996:105), mengemukakan bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai atau karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan atau diberikan kepadanya dan dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, kesanggupan, pengalaman dari pegawai yang bersangkutan.

Mc Clelland (1976:111) juga memberikan pendapat mengenai kinerja yaitu suatu prestasi kerja yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat dikembangkan, seperti menyukai pengambilan resiko dan suatu tantangan, mempunyai kecenderungan dalam menetapkan tujuan, mempunyai kebutuhan yang kuat dalam pekerjaannya, dan terakhir mempunyai keterampilan dalam perencanaan.

Berikutnya menurut pendapat Ruki (2002:5-17) menyatakan kinerja adalah catatan tentang suatu hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan tertentu untuk kegiatan yang tertentu dan dalam kurung waktu tertentu pula (dalam Syamsul Ridjal 2010:30).

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, kita dapat memahami bahwa kinerja merupakan kemampuan yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil kerja yang diharapkan dapat bersama kearah tercapainya tujuan lembaga atau perusahaan yang telah ditetapkan.

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat suatu pencapaian tujuan atau pelaksanaan kegiatan atau kebijakan atau program dalam mewujudkan visi dan misi, tujuan, sasaran, yang telah tertuang dalam perumusan masalah strategis, Indra Bastian (dalam irham fahmi 2010:35). Selain beberapa pengertian kinerja terdapat hal yang sangat menentukan kinerja, sebagai berikut:

Menurut simamora (1995:500), tiga hal yang sangat menentukan kinerja yaitu:

- a. Faktor individual yang meliputi latar belakang, demografi dan kemampuan dan keahlian seseorang
- b. Faktor psikologis yang meliputi motivasi, personality, persepsi dan attitude.
- c. Faktor organisasi yang terdiri dari kepemimpinan, sumber daya manusia, struktur, penghargaan, job design. (dalam Ummi Masitahsari:2016).

Ada enam kriteria atau dimensi untuk mengukur kinerja, menurut Bernadin (dalam sudarmanto 2009:12) yaitu:

- a. Kualitas pekerjaan (quality) merupakan nilai atau hasil dalam melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan.
- b. Kuantitas pekerjaan (quantity) merupakan jumlah pekerjaan yang dilakukan maupun yang dihasilkan, biasa juga disebut dengan jumlah kegiatan yang telah terlaksana atau telah dikerjakan.

- c. Ketepatan waktu (timeliness) dimaksud adalah ketepatan waktu dimana suatu pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
- d. Efektifitas biaya (cost-efferctiveness) dimaksudkan mengurangi pemborosan dalam suatu organisasi.
- e. Kebutuhan akan pengawasan (need for supervision) merupakan pegawai atau karyawan tanpa diawasi oleh pengawas pimpinan.
- f. Kemampuan diri (interpersonal impact) dimana yang dimaksud merupakan kemampuan diri sendiri dalam meningkatkan kerja sama antara pekerja yang lainnya.

12. Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan

Rumah Pemotongan Hewan yang disebut dengan (RPH) merupakan sebuah kompleks bangunan dengan desain khusus yang digunakan untuk memotong hewan untuk dikonsumsi masyarakat luas, (Septina 2010). Rumah Potong Hewan (RPH) Menurut SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 2006, Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan, Usaha dan/atau kegiatan RPH meliputi: pemotongan, pembersihan lantai tempat pemotongan, pembersihan kandang penampung, pembersihan kandang isolasi, dan/atau pembersihan isi perut dan air sisa

perendaman. Rumah Pemotongan Hewan merupakan unit/sarana pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging sehat mempunyai fungsi sebagai:

1. Tempat dilaksanakannya pemotongan hewan secara benar.
2. Tempat dilaksanakannya pemeriksaan hewan sebelum dipotong (antemortem) dan pemeriksaan daging (post mortem) untuk mencegah penularan penyakit hewan ke manusia.
3. Tempat untuk mendeteksi dan memonitor penyakit hewan yang ditemukan pada pemeriksaan ante mortem dan post mortem guna pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular di daerah asal hewan.
4. Melaksanakan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif.

Menurut Lestari (dalam zulkifli:2014) bahwa Rumah Pemotongan Hewan mempunyai fungsi antara lain sebagai:

1. Sarana strategis tata niaga ternak ruminansia, dengan alur dari peternak, pasar hewan, RPH yang merupakan sarana akhir tata niaga ternak hidup, pasar swalayan/pasar daging dan konsumen yang merupakan sarana awal tata niaga hasil ternak.
2. Pintu gerbang produk peternakan berkualitas, dengan dihasilkan ternak yang gemuk dan sehat oleh petani sehingga mempercepat transaksi yang merupakan awal keberhasilan pengusaha daging untuk dipotong di RPH terdekat.

3. Menjamin penyediaan bahan makanan hewani yang sehat, karena di RPH hanya ternak yang sehat yang bisa dipotong.
4. Menjamin bahan makanan hewani yang halal.
5. Menjamin keberadaan menu bergizi tinggi, yang dapat memperkaya masakan khas Indonesia dan sebagai sumber gizi keluarga/rumah tangga.
6. Menunjang usaha bahan makanan hewani, baik di pasar swalayan, pedagang kaki lima, industri pengolahan daging dan jasa boga.

Dalam Manual Kesmavet (1993) Syarat-syarat RPH telah diatur juga didalam SK Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986. Persyaratan ini dibagi menjadi prasyarat untuk RPH yang digunakan untuk memotong hewan guna memenuhi kebutuhan lokal di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, memenuhi kebutuhan daging antar Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam satu Propinsi Daerah Tingkat I, memenuhi kebutuhan daging antar Propinsi Daerah Tingkat I dan memenuhi kebutuhan ekspor, (Zulkifli Asdar:2014)

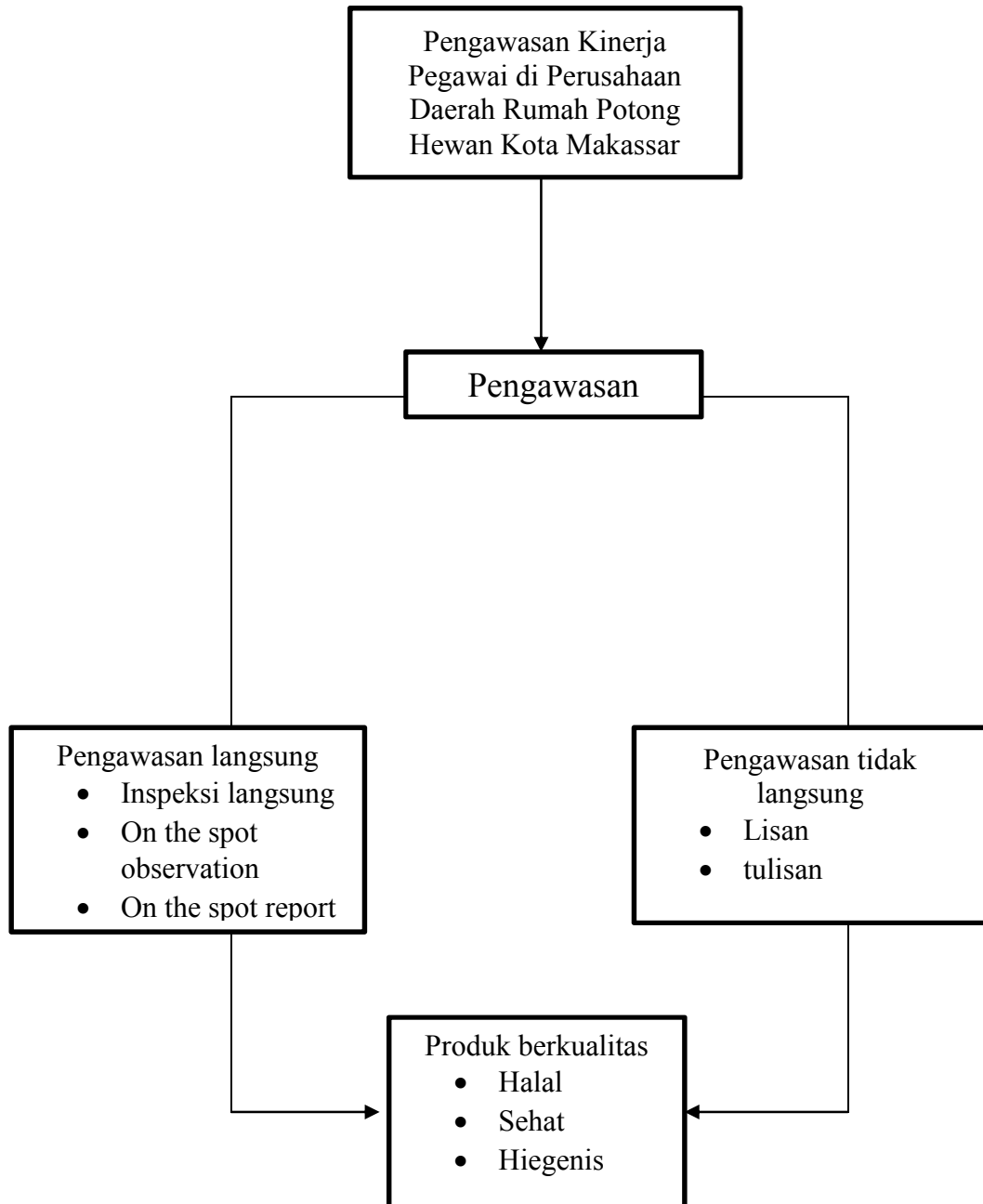
Di Kota Makassar terdapat rumah potong hewan yang dikelola langsung oleh perusahaan daerah rumah potong hewan Kota Makassar. Rumah potong hewan sekarang ini sudah butuh perbaikan, banyak yang mengeluhkan kinerja perusahaan daerah Kota Makassar yang tidak maksimal, pengawasan yang dilakukan terhadap hewan sebelum dipotong jarang dilakukan akibatnya banyak hewan sakit yang masih lolos potong, kehiegenisan dari rumah potong hewan sendiri sangat kurang daging yang telah dipotong berserakan disembarang tempat padahal seharusnya daging yang telah dipotong harus mempunyai tempat khusus

demi menjaga sterilisasinya, karena daging sangat mudah terjangkit bakteri perlakuan hewan yang telah dipotong menggunakan dua macam teknik pertama daging tidak dipisahkan dengan tulangnya dan ada juga yang dipisahkan dari tulangnya (Siti Nurani Sirajuddin, Aslina Sanawi:2013).

Selain itu pengawasan kebersihan rumah potong hewan tidak optimal, rumah potong hewan juga sudah butuh perbaikan, pengawasan terhadap limbah pembuangan dan instalasi pengelolaan air limbah atau yang biasa disebut dengan (IPAL) masih kurang. Pengawasan pegawai terhadap situasi di rumah potong hewan sangat tidak maksimal karena bau menyengat tercium sampai pemukiman penduduk selain itu pengawasan kinerja pegawai terhadap perlakuan hewan yang telah dipotong sangat tidak maksimal.

B. Kerangka Pikir

Pengawasan kinerja pegawai pada perusahaan daerah rumah potong hewan Kota Makassar diperlukan agar RPH dapat menghasilkan produk daging berkualitas yang sesuai standar yang ada di perusda RPH Kota Makassar alami, sehat, utuh, halal (ASUH) dan pemetongannya sesuai dengan syariat islam. Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang ada di perusda RPH Kota Makassar diperlukan beberapa indikator untuk mengukur pengawasan menurut Henry Fayol (siagian:2003) yaitu: 1) pengawasan langsung yang terdiri dari direct inspection, on the spot observation, dan on the spot report dan 2) pengawasan tidak langsung yang terdiri dari lisan dan tulisan sehingga pengawasan dapat dijalankan. Berikut kerangka pikir dan teori yang ditetapkan dari penulis:



Gambar 3.1: skema kerangka pikir

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian yaitu pengawasan kinerja pegawai Di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar yang akan dijelaskan melalui teori Henry Fayol yang didalamnya terdapat Teknik pengawasan yang akan digunakan sebagai indikator, yaitu:

1. Pengawasan langsung kinerja pegawai diperusahaan daerah rumah potong hewan Kota Makassar menggunakan tiga cara pengawasan yaitu a) direct inspection atau inspeksi langsung dengan cara mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. di perusda RPH kota Makassar mempunyai pegawai yang khusus bertugas pada bagian pengawasan dengan Teknik inspeksi langsung ditambah satu orang dokter, pegawai yang bertugas ini melakukan pengawasan terus menerus setiap hari dimulai dari beroperasinya proses pemeriksaan hewan sampai proses pemotongannya selesai, selain dari pegawai yang ditugaskan pada bagian pengawasan terdapat satu dokter untuk melakukan pemeriksaan sebelum hewan akan dipotong, b) Pengawasan On the spot observation merupakan pengawasan langsung di tempat pengamatan. Pada perusda RPH kota Makassar pengawasan dengan cara on the spot observation dilakukan oleh ketiga direktur perusda RPH kota Makassar yaitu direktur utama, direktur umum, dan direktur operasional, dan c) Pengawasan on the spot report merupakan pengawasan pada laporan yang diberikan oleh pegawai perusda terhadap pimpinan secara langsung atas hasil pekerjaannya.

2. Pengawasan tidak langsung kinerja pegawai diperusahaan daerah rumah potong hewan kota Makassar. Pengawasan secara tidak langsung pada perusda menggunakan dua cara yaitu lisan dan tulisan, secara lisan pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh pimpinan dari jarak jauh terhadap hasil kerja pegawainya, dan secara tulisan dilakukan oleh pimpinan dengan cara memeriksa absensi pegawai, pengawasan secara mendadak atau sidak, dan berkala.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juni sampai bulan juli tahun 2017 di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan yang berlokasi di JL.Tamangapa kompleks RPH Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. Penelitian ini tentang pengawasan kinerja pegawai pada perusda RPH Kota Makassar dengan menggunakan teori dari Henry Fayol. Alasan peneliti tertarik mengambil penelitian ini karena daging merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat diperlukan tubuh oleh karena itu kehalalan, kebersihan, kehiegenisan dan cara pemotongan dan pengelolaannya haruslah dengan baik, benar dan sesuai dengan syariat islam mengingat 83% penduduk yang ada di Kota Makassar adalah penduduk muslim.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang yang diamati. Dengan maksud peneliti mendapat dan mengumpulkan data yang mendalam langsung dari lokasi penelitian tentang pengawasan kinerja diperusahaan daerah rumah potong hewan Kota Makassar

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ialah tipe penelitian studi kasus yang merupakan bentuk penelitian yang meneliti fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks yang terbatas.

C. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ialah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang didapatkan dari hasil :

1. Teknik *interview* atau wawancara yaitu melakukan wawancara yang lebih mendalam terhadap informan yang telah ditunjuk dengan mengajukan beberapa daftar pertanyaan pada perusahaan daerah rumah potong kewan Kota Makassar

2. Teknik *Observasi* yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data tentang pengawasan kinerja yang terjadi diperusda RPH Kota Makassar.

3. Data sekunder

Data yang diperoleh peneliti melalui studi pustaka (*Library Search*) yaitu mengambil data dari sejumlah buku, literatur, internet, tulisan-tulisan karya ilmiah, maupun perundang-undangan yang mampu mendukung kelengkapan data sekunder.

D. Informan penelitian

Informan yang terdiri dari orang-orang yang berpotensi untuk memberikan data dan informasi terkait dengan fokus penelitian. Untuk diwawancarai secara mendalam yang dilakukan dengan cara peneliti memilih orang tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai pengawasan kinerja

pegawai pada perusahaan daerah rumah potong hewan kota Makassar. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut.

tabel 3.1 Data informan peneliti

No	Nama	Jabatan
1.	Tamrin Mensa, ST, MM	Direktur umum Perusahaan Daerah RPH Kota Makassar
2.	Moch Luthfi Noegraha, S.Si	Direktur operasional Perusahaan Daerah RPH Kota Makassar
3.	Drs. Syahrir	Seksi Pemotongan Hewan Perusahaan Daerah RPH Kota Makassar Karyawan Perusahaan Daerah RPH Kota Makassar
4.	Ahmad Lala	Pengusaha pemotong Perusahaan Daerah RPH Kota Makassar
5.	Syahrudin Ridwan, SS	Ketua badan Pengawas Perusahaan Daerah RPH Kota Makassar
6.	Rusmawati	Seksi umum dan kepegawaian Perusahaan Daerah RPH Kota Makassar
7.	Bate	Tukang jagal RPH Kota Makassar

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara langsung

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung dan mendalam mengenai pengawasan kinerja pada perusahaan daerah rumah potong hewan kota Makassar. Dalam proses wawancara ini, peneliti menggunakan alat bantu seperti buku tulis dan pena agar proses wawancara dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini untuk memudahkan peneliti mengingat kembali saat penulisan dalam bentuk karya ilmiah.

2. Observasi (pengamatan)

Observasi atau yang biasa disebut dengan pengamatan dalam penelitian ini dilakukan peneliti dengan cara terjun langsung ke lokasi yang diteliti yaitu terjun langsung pada perusahaan daerah rumah potong hewan kota Makassar, guna untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu paling utama. Jenis observasi ini dilakukan dengan cara terbuka cara ini akan mampu melihat kejujuran informan untuk memberikan informasi yang sebenar-bebarnya.

3. Dokumentasi

Dimana data yang didapatkan peneliti yang berkaitan dengan objek peneliti didapatkan dari sumber buku, arsip-arsip, maupun data yang tersimpan dalam website.

F. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitiann ini ialah analisis deskriptif kualitatif yang memuat aspek yaitu : (1) analisis sebelum ke lapangan dengan melakukan analisis data hasil studi pendahuluan yang digunakan dalam penentuan focus penelitian yang berkaitan dengan pengawasan kinerja pegawai diperusahaan daerah rumah potong hewan Kota Makassar. (2) analisis selama di lapangan dengan menggunakan model Miles and Huberman (Sugiono, 2012 : 246) bahwa terdapat beberapa komponen tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

1. Pengumpulan data yaitu penelitian yang melakukan pengumpulan data hasil studi pendahuluan sebelum kelapangan menganalisis data hasil tersebut

untuk keperluan penentuan focus peneliti dan pengumpulan data setelah di lapangan tentunya dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang dianggap relevan melalui reduksi data

2. Reduksi data yaitu data yang terkumpul atau diperoleh dilapangan tentunya dianalisis untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dianggap relevan melalui reduksi data. data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya yang dianggap penting.

3. Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Penyajian data dalam bentuk gambaran yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan kesimpulan penelitian

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan peneliti perlu diverifikasi agar mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data merupakan bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang diukur benar-benar merupakan variable yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang cepat. Salah satu caranya yaitu dengan triangulasi yaitu Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atausebagai perbandingan terhadap data itu.

1. Triangulasi sumber

Triagulasi sumber adalah membandingkan dengan cara mengecek ulang dengan kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dari informan, kemudian membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada untuk melihat perbedaan dan kesamaan pendapat yang dapat dilihat dari hasil wawancara dan dokumen.

2. Triagulasi tehnik

Tehnik data untuk memperoleh informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut. Untuk menguji akuratnya sebuah data maka peneliti menggunakan tehnik tertentu yang berbeda dengan tehnik yang digunakan sebelumnya.

3. Triagulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validasi data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja, Moleong (2014).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran umum Kota Makassar

a. Kondisi geografis

Kota Makassar merupakan ibu kota provinsi Sulawesi selatan, Kota Makassar mempunyai letak posisi yang strategis karena menjadi pintu dari Kawasan barat ke Kawasan timur Indonesia. Ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut dan merupakan daerah pantai yang datar karena mempunyai kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, kota ini diapit oleh dua muara sungai yaitu sungai Jeneberang dan sungai Tallo. Dahulu sejalan dengan perluasan wilayah, Makassar sebagai nama kota dimasa pemerintahan republik Indonesia diubah menjadi Ujung Pandang, saat itu luas wilayah kurang lebih 175,77 km² dari luas wilayah sebelumnya ± 21 km². Kemudian pada tanggal 13 Oktober sebagai bentuk keinginan masyarakat yang mendapatkan dukungan dari pemerintah kota dan berdasar pada peraturan pemerintah nomor 86 tahun 1999 tentang perubahan nama kota Ujung Pandang menjadi kota Makassar dalam wilayah provinsi Sulawesi selatan kota ini diberi nama kembali kota Makassar.

b. Luas wilayah

Luas wilayah perairan ±175,77 km² daratan, kota Makassar memiliki 11 pulau dan luas wilayah perairan ± 100 km², 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan.

Diantara 14 kecamatan yang ada dikota makassar terdapat 7 kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan tamalate, wajo, ujung tanah, mariso, tamalanrea, biringkanaya dan tallo. Gambaran luas wilayah perkecamatan dalam kota Makassar, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 luas wilayah kota Makassar menurut kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah	Desa/kelurahan
1.	Mariso	1.82 km ²	9
2.	Mamajang	2.25 km ²	13
3.	Tamalate	18.18 km ²	11
4.	Rappocini	9.24 km ²	11
5.	Makassar	2.54 km ²	14
6.	Ujung Pandang	2.63 km ²	10
7.	Wajo	1.99 km ²	8
8.	Bontoala	2.1 km ²	12
9.	Ujung Tanah	5.94 km ²	9
10.	Tallo	8.71 km ²	15
11.	Panakkukang	17.51 km ²	11
12.	Manggala	23.74 km ²	8
13.	Biringkanaya	48.22 km ²	11
14.	Tamalanrea	31.86 km ²	8

Sumber: Makassar Dalam Angka 2017

c. Kependudukan

Jumlah penduduk di kota Makassar 1.339.347 jiwa yang tersebar pada 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Penduduk yang ada dikota Makassar pada umumnya mayoritas beragama islam dengan persentase 82,39%. Penduduk yang

beragama islam kurang lebih ini terdiri dari berbagai etnis. Etnis yang didominasi suku makassar, mandar, toraja dan bugis, jawa, buton, tionghoa dan sebagainya. Secara umum jumlah penduduk kota Makassar dari tahun ketahun semakin meningkat.

Dengan penduduk muslim yang mendominasi dikota makassar maka kehalalan dari makanan yang dikonsumsi menjadi hal yang sangat penting. Seperti pada daging yang merupakan salah satu bahan makanan yang sangat diperlukan tubuh karena mengandung protein hewani, energi, air, mineral dan vitamin, selain itu daging hampir disukai oleh semua orang karena memiliki rasa dan aroma yang enak. Karena daging merupakan salah satu bahan makanan yang penting dikonsumsi tubuh jadi daging yang kita konsumsi harus sehat dan baik. Daging yang dihasilkan dari tempat pemotongan hewan baik yang dari pabrik maupun tempat pemotongan hewan yang sederhana. Daging sebelum dipasarkan harus terlebih dahulu diperiksa untuk mencegah berbagai hal yang dapat merugikan masyarakat yang mengkonsumsinya. Salah satu tahap yang sangat menentukan kualitas dan keamanan daging dalam mata rantai penyediaan daging adalah tahap di rumah pemotongan hewan (RPH).

Diperlukan pengawasan yang baik agar kualitas dan keamanan pada daging dapat terpenuhi, pengawasannya juga tentu tidak lepas dari peran pihak perusda RPH kota Makassar yang memiliki tanggung jawab manajemen perusahaan agar menghasilkan produk yang berkualitas.

2. Gambaran umum Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar

1. Sejarah umum berdirinya perusahaan daerah rumah potong hewan Kota Makassar

Di kota makassar Rumah potong hewan mulai berdiri sejak tahun 1983, beroperasi awal mula pada tahun 1983 sampai pada tahun 1991. Rumah potong hewan ini awal mulanya berada pada tiga tempat. Tempat tersebut yaitu Parang Tambung, Maccini Dan Bara-baraya dengan dikelola langsung oleh dinas peternakan yang tercantum dalam perda no.11 tahun 1983 tentang berdirinya RPH dengan dikelola langsung oleh dinas peternakan. Luas lahan RPH tersebut masing-masing antara 0,26-0,6 Ha dengan bangunan yang kondisinya sangat sederhana. RPH pada saat dibangun di ketiga lokasi tersebut kondisinya masih berada pada daerah pinggiran kota makassar yang belum berkembang disana masih dijumpai lahan tanah kering, rawa-rawa, persawahan dan perkampungan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan kota makassar yang semakin padat peningkatan penduduk dan juga pemukiman yang semakin padat maka dipikirkanlah keberadaan RPH yang berlokasi ditempat itu untuk dipindahkan lokasinya dikarenakan suasana yang sudah tidak nyaman, juga bau busuk yang ditimbulkan RPH. hal ini dikarenakan dengan pembangunan perkantoran, pusat bisnis, Pendidikan dan pembangunan perumahan-perumahan yang mulai marak diwilayah pusat kota Makassar maka selama delapan tahun beroperasi atau pada tahun 1991 lokasi RPH yang dulu masih terdapat lahan persawahan dan rawa-

rawa sudah berada ditengah-tengah pusat kegiatan perkantoran, Pendidikan, bisnis, dan pusat pemukiman penduduk kota makassar.

RPH yang dulu berlokasi pada tiga tempat sejak tahun 1991 telah disatukan pada satu tempat dan tujuan agar dapat dikelola dengan baik. RPH pada saat disatukan masih dikelola oleh dinas peternakan selama depan tahun berjalan, maka pada saat dilakukan penyatuan ketiga RPH maka didirikanlah juga Perusahaan Daerah Rumah potong hewan tamangapa kota Makassar berdasarkan pada peraturan daerah pemerintah kota makassar No.6 Tahun 1999 tentang RPH tamangapa yang dialihkan ke Perusahaan Daerah yang berorientasi kepada pelayanan terhadap penggunaan jasa pendapatan pelayanan agar lebih optimal kinerja.

2. Nilai-nilai yang Terkandung dalam Perusda

1. Nilai Utama Pegawai

Selain dari pegawai tidak ada nilai yang lebih baik karena pegawai sebagai prioritas dalam perusahaan. Untuk itu nilai pegawai melahirkan siri na pace dan sipakatau, pada idi, pada elo, sipatuwo sipatokkong.

2. Nilai kejujuran

Pegawai dan manajemen PD RPH Kota Makassar senantiasa dan menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam bekerja. Kejujuran ini melahirkan motivasi dan etos kerja untuk melayani dan mengembangkan visi dan misi perusahaan

3. Nilai kerendahan hati

Manajemen PD RPH Kota Makassar memiliki nilai kerendahan hati dalam melayani setiap pengguna jasa PD RPH Kota Makassar, agar fungsi pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal.

4. Nilai komitmen

Bahwa pegawai memiliki nilai komitmen mengembangkan perusahaan menuju ke arah yang lebih baik. Dari nilai komitmen inilah pegawai PD RPH Makassar menuangkan visi dan misi perusahaan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai institusi bisnis yang akan meraih apresiasi dari pengguna dan masyarakat.

5. Nilai loyalitas

Bahwa pegawai PD RPH Kota Makassar memiliki nilai loyalitas terhadap perusahaan dan telah menjadi membudaya dalam perusahaan ini. Nilai loyalitas inilah yang membuat perusahaan tetap kuat menjalankan aktivitasnya. Nilai inilah menjadi norma yang melahirkan budaya kerja organisasi dan menjadi sikap dan komitmen dalam bertindak.

3. Letak Wilayah

Perusahaan daerah rumah pemotongan hewan tamangapa Kota Makassar berlokasi di jalan Tamangapa Raya Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. Secara administratif terletak di Lingkungan Kassi, dengan aksesibilitas sangat baik dan dapat dijangkau oleh jenis kendaraan dan semua kondisi cuaca.. Dengan batas lokasi kegiatana RPH Tamangapa yaitu:

- a. sebelah selatan berbatasan langsung dengan lahan pertanian
- b. sebelah barat berbatasan langsung dengan lahan pertanian juga pemukiman warga atau penduduk
- c. sebelah utara berbatasan langsung dengan pemukiman staff RPH dan juga lahan pertanian dan
- d. sebelah timur berbatasan langsung dengan lahan pertanian.

4. Visi dan Misi perusahaan Daerah Rumah Potong hewan Kota Makassar

Visi perusda RPH Kota Makassar yaitu :

Menjadi Pusat Produksi dan Pelayanan Daging yang Alami, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), berbasis usaha mandiri dengan kearifan lokal

Misi Perusda RPH Kota Makassar yaitu:

- a. Menyajikan pelayanan, pemberdayaan, serta sebagai fasilitator yang berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa dan produksi PD RPH Kota Makassar.
- b. PD RPH Kota Makassar pusat pelelangan ternak, dan pemasaran pengelolaan daging hewan dari berbagai daerah dan provinsi penghasil ternak di Kawasan Timur dan Tengah Indonesia.
- c. Menjamin kualitas dan kuantitas daging ternak yang alami, sehat, utuh, dan halal (ASUH) sehingga layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

- d. Mempertahankan kesinambungan usaha PD RPH Kota Makassar yang mandiri dan tangguh dengan mengandalkan kompetensi sumberdaya manusia, iptek dan kearifan lokal.
- e. Meningkatkan kapabilitas SDM, optimalisasi asset yang dimiliki, serta membangun jaringan kerja dan kemitraan yang seluas-luasnya.
- f. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan PD RPH Kota Makassar.
- g. Mempersiapkan PD RPH Kota Makassar untuk memperoleh sertifikat SNI dan ISO 12000 sebelum tahun 2015 .
- h. Tujuan dan Sasaran Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar:

Adapun tujuan pendirian PD RPH Kota Makassar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Kota Makassar No. 6 tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan adalah : menyediakan daging segar bagi konsumen dan melindungi konsumen dari daging yang tidak layak konsumsi, memperbaiki sarana dan prasarana RPH dan memberikan pengamanan dan keamanan kepada mitra kerja.

Perusda RPH kota Makassar disamping memiliki tujuan juga mempunyai beberapa standar tujuan, berikut standar tujuan perusda RPH:

Tabel 4.2 standar tujuan perusda RPH kota Makassar

Standar tujuan	
Besaran usaha	18.000 hewan potong pertahun rata-rata 50 ekor perhari
Pertumbuhan	Omset tumbuh: 3% per tahun (asumsi sesuai dengan pertumbuhan penduduk kota Makassar)
Keunggulan	Fasilitas produksi dan layanan terbaik
Pangsa pasar	Kawasan timur, khususnya sul-sel

Sumber: perusda RPH kota Makassar 2017

Untuk efektifitas pencapaian tujuan tersebut di atas, maka Perusda RPH Kota Makassar perlu menetapkan secara jelas dan spesifik standar tujuan pencapaiannya dapat dilakukan secara bertahap. Disamping beberapa tujuan umum dan standar tujuan di atas, perusda RPH kota Makassar memiliki tujuan khusus yakni ;

- a. Menghitung dan menggambarkan secara cermat dan teliti semua aspek, kriteria dan indikator pada variable yang berkaitan dengan usaha pokok (core bisnis) sebagai input untuk menghasilkan output yang rasional dan dapat dipertanggung jawabkan
- b. Memberikan gambaran umum rencana-rencana usaha yang tersusun berdasarkan estimasi fisik yang ingin dicapai dan besaran biaya yang diperlukan sesuai dengan tata waktu yang ditetapkan
- c. Menetapkan rencana-rencana perusahaan dalam kurun waktu tertentu yang realistis sesuai dengan semua aspek perusahaan dan kemampuan yang dimilikinya

Adapun manfaat yang diharapkan adalah ;

- a. Sebagai Pedoman direksi dan jajarannya dalam menjalankan strategi perusahaan
- b. Merupakan alat bagi direksi dalam mengelola atau mengendalikan perusahaan daerah.
- c. Terciptanya perusahaan yang efektif dan efisien dalam menjalankan roda organisasi dan manajemen yang profesional, guna mencapai visi- misi, tujuan dan sasaran perusahaan.

6. Aspek Regulasi

Salah satu keunggulan PD RPH Kota Makassar, karena adanya payung regulasi berupa Peraturan Daerah Pemerintah Kota Makassar sebagai bentuk perlindungan aktivitas PD RPH Kota Makassar. Regulasi ada 2 bentuk yakni regulasi yang mendukung dan regulasi yang tidak mendukung sebagai berikut ; Adapun regulasi yang mendukung RPH Makassar adalah

- a. Pengelolaan RPH Makassar yakni Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Makassar dan
- b. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Makassar (Lembar Daerah Kota Makassar No, 3 Tahun 2000 Seri D No.

Sedangkan regulasi yang menghambat diantaranya

- a. Peraturan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah / Kota asal hewan yang cenderung birokratif dan pajak tinggi.
- b. Peraturan kepabeanan di pelabuhan - pelabuhan tempat hewan ternak dimuat dan pelabuhan bongkar di daerah tujuan dengan tarif tinggi.
- c. Perda yang dibutuhkan saat ini untuk melindungi PD RPH Makassar dari serbuan daging impor dan daging tidak jelas kehalalannya adalah Perda *Tentang Perlindungan Konsumen atas daging impor dan penjualan daging sehat dan halal*. Karena banyak daging ternak sapi dan kerbau yang beredar / dijual di Makassar tidak bermutu dan tidak jelas kehalalannya. Untuk itu perlu sertifikasi sehat dan halal dari instansi terkait untuk dikerja samakan dengan pihak terkait Seperti MUI, Balai POM dan Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan, khususnya pengawasan peredaran daging di Kota Makassar.

7. Kondisi Umum Rumah Potong Hewan Kota Makassar

Rumah potong hewan Kota Makassar merupakan tempat bagi hewan dipotong yang diatur sesuai peraturan Daerah Kota Makassar No.3 Tahun 1984. Berdasarkan peraturannya sebelum hewan dipotong harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu oleh dokter hewan bahkan sesudah dipotong. Terdapat pengenaan retribusi pemeriksaan daging dan retribusi pajak potong, juga retribusi pemakaian RPH Kota Makassar. PD RPH Kota Makassar selama ini melayani pematangan hewan berkisar 40 - 50 ekor per hari. Hal ini berarti masih terdapat 75 - 85 ekor sapi atau

kerbau berasal dari luar PD RPH Kota Makassar. Kondisi tersebut menggambarkan tantangan sekaligus peluang bagi prospek pengembangan PD RPH Kota Makassar dimasa mendatang.

Luas lahan RPH Kota Makassar yaitu 40.206 M dengan peruntukan 2.138,017 M untuk bangunan dan 38.077, 983 M untuk lahan terbuka. Terdapat berbagai sarana dan prasarana yang tersedia di RPH Kota Makassar yakni, kandang pemeriksaan hewan, ruang pemeriksaan daging, ruang pencucian jeroan termasuk persediaan air bersih dan penerangan, kandang penampungan, ruang tempat untuk memotong hewan, ruang cutting, dan ruang pelayuan. Disekitar RPH ini terdapat :

- a. kandang ternak
- b. sarana air bersih
- c. WC
- d. rumah dinas
- e. kantor administrasi
- f. dan tempat pemusnahan hewan yang sakit.

Saat ini Perusda RPH Kota Makassar belum dapat dikategorikan perusahaan yang mandiri, karena jumlah keuntungan yang diperolehnya 3 (tiga) tahun terakhir ini masih rendah dan masih memerlukan suntikan modal usaha. Demikian juga pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya teknologi yang ada. Sementara potensi pengembangannya cukup memiliki

peluang menjadi perusahaan yang tangguh dan mandiri guna memberi kontribusi pada sektor penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan pengelolanya. Untuk itu perusda RPH Kota Makassar mencoba meletakkan sasaran dan target perusahaan yang ingin dicapai secara periodik dan bertahap, berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Tahapan rencana pencapaian tersebut di bagi menjadi tiga bagian yakni ;

- a. tahap pertama adalah periode peletakkan pondasi bisnis yang kuat.
- b. tahap kedua adalah periode pemantapan dan pengembangan dan
- c. tahap ketiga adalah periode perusahaan yang tangguh dan mandiri.

Lebih lengkapnya tahapan mencapai target dan sasaran tersebut seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 rencana strategis RPH kota Makassar

Periode	Fase	Target/sasaran
Pertama (2011-2014)	Peletakan fondasi bisnis melalui pendayagunaan asset secara optimal untuk mempertahankan volume bisnis	Pembangunan dan pengembangan serta optimalisasi sarana dan prasarana, SDM, teknologi, memperkuat jaringan suplier dan pemasaran, membangun kerjasama/ kemitraan dengan instansi terkait maupun swasta untuk mendukung program antar instansi dan memperoleh akses sumber-sumber pembiayaan. Hasil yang diharapkan pada periode ini adalah aktivitas bisnis PD RPH Kota Makassar berjalan optimal serta menjamin ketersediaan kualitas dan kuantitas daging ternak alami, sehat, utuh, dan halal (ASUH) yang layak konsumsi, SDM profesional & kapabel, perusahaan mampu menciptakan benefit dan meraih profit.
Kedua (2014-2016)	Pemantapan & pengembangan asset serta jaringan pasar untuk mening-katkan pertum-buhan volume bisnis	Hasil yang dicapai pada periode pertama dilanjutkan dengan memperkuat fondasi menuju usaha mandiri yang tangguh, dan memperoleh sertifikasi kualitas layanan dan produksi. Hasil yang diharapkan pada periode ini adalah PD RPH Kota Makassar memiliki asset yang kuat, bisnis yang bertumbuh, raihan profit yang terus meningkat sehingga dapat menjadi kontributor bagi PAD Kota Makassar.
Ketiga (2017-2020)	Perusahaan yang tangguh, mandiri, dgn pertumbuhan yang berkelan-jutan	PD RPH Kota Makassar mempertahankan diri sebagai perusahaan yang unggul dan memiliki ketangguhan dalam menghadapi persaingan bisnis guna mendukung Makassar menjadi kota dunia

Sumber: perusda RPH kota Makassar 2017

Pemotongan hewan pada Perusda RPH Kota Makassar dilakukan setiap hari, waktu pemotongan dimulai pada pukul 02:00 sampai 06:00 WITA. Untuk jumlah itu Tergantung dari jumlah permintaan pasar dan pengusaha potong karena hewan yang ingin dipotong di Perusda RPH Kota Makassar semuanya milik pengusaha potong. Pengusaha yang terdapat pada Perusda RPH Kota Makassar juga terbagi pada dua kelompok dimana ada kelompok yang tidak termasuk dalam persatuan pemotong ternak Kota Makassar dan ada yang masuk dalam persatuan pemotong.

Dari pemotong yang masuk dalam perkumpulan berjumlah 42 orang dan yang tidak masuk dalam perkumpulan persatuan pemotong ternak Kota Makassar berjumlah 10 orang. Tetapi dari keseluruhan pengusaha potong tersebut tidak semuanya aktif dalam melakukan pemotongan setiap harinya, ada yang melakukan pemotongan jika terdapat permintaan saja.

Table 4.4 pengusaha potong perusda RPH kota Makassar

No.	Nama Pengusaha Potong	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan
1.	H. Madi Kalu	51	Laki-laki	S1
2.	H. Alimuddin	54	Laki-laki	S1
3.	H. Sija	43	Laki-laki	S1
4.	H. Pabe	47	Laki-laki	S1
5.	Iwan Bella	45	Laki-laki	SMP
6.	Abd. Aziz	39	Laki-laki	SMA
7.	H. Hasyim	28	Laki-laki	SMA
8.	Nyampe	34	Laki-laki	SMA
9.	Diri	47	Laki-laki	SMA
10.	Dg. Lala	44	Laki-laki	SMA

Sumber: perusda RPH kota Makassar 2017

Tenaga kerja yang dipekerjaan pada Perusda RPH Kota Makassar yaitu:

- a. terdapat sepuluh orang karyawan kantor,
- b. tukang jagal sebanyak tiga orang,
- c. dan satu orang dokter yang statusnya sebagai karyawan tetap,
- d. Untuk bagian pengulitan dan penyediaan makanan ternak menjadi tugas penduduk sekitar RPH Kota Makassar dan tidak ditentukan jumlahnya,
- e. Untuk bagian pengelolaan kandang yang statusnya sebagai pekerja tenaga kontrak terdapat lima orang,
- f. Untuk pengelolaan daging hewan yang telah dipotong oleh pemilik atau pengusaha terdapat 7 orang.

Syarat-syarat hewan yang akan dipotong pada perusda RPH Kota Makassar:

1. Syarat ternak yang akan dipotong adalah kondisi ternak harus dalam keadaan sehat dan segar,
2. untuk itu setelah ternak tiba dirumah potong perlu diistirahatkan terlebih dahulu sampai kondisi ternak kembali segar.

Untuk hewan betina, boleh dipotong dengan syarat :

- a. Tidak dipotong untuk diperjual belikan.
- b. Betina tersebut mendapat kecelakaan.
- c. Betina itu terkena penyakit yang bisa menimbulkan kematian. (misalnya penyakit kembung perut).
- d. Betina tersebut dapat membahayakan manusia.

- e. Menurut peraturan yang dibuat harus disembelih (umumnya dalam rangka memberantas penyakit).

B. Hasil penelitian pengawasan kinerja pegawai diperusahaan daerah rumah potong hewan Kota Makassar

Pengawasan merupakan kegiatan pemimpin dalam organisasi yang mengusahakan agar tugas-tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang diinginkan. Pengawasan adalah suatu proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan berperan sangat penting dalam menentukan suatu pencapaian tujuan. Pengawasan kinerja pegawai pada dasarnya merupakan salah satu unsur yang penting dalam perusahaan, pengawasan menjadi sumber daya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dalam perusahaan.

Terdapat dua macam Teknik pengawasan yang dapat digunakan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, pengawasan langsung yaitu apabila seorang pimpinan dalam organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya, pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung, on-the-spot observation, dan on-the-spot report. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan tersebut bias saja dapat berbentuk: tertulis, dan lisan.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh perusda RPH memiliki peranan yang cukup besar terhadap rumah potong hewan. Pengawasan terhadap

ketersediaannya sarana dan prasarana yang wajib RPH miliki seperti instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), hewan yang sudah lama mati tetapi masih lolos potong. Yang terpenting adalah pengawasan pada hewan yang ingin dipotong karena disini mencegah hewan sakit yang lolos potong. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan direktur operasional perusda RPH Kota Makassar

“...kita melakukan pengawasan agar menjamin kehalalan dan kesehatan daging untuk dikonsumsi masyarakat, sebagaimana tujuan dari perusda RPH kota makassar pada salah satu pointnya yaitu menyediakan daging segar bagi konsumen, dan menghindari adanya daging yang tidak layak untuk dikonsumsi” (wawancara informan L tanggal 29 juni 2018)

Berdasarkan wawancara tersebut pihak perusda melakukan pengawasan agar menjamin kesehatan dan kehalalan daging untuk dikonsumsi oleh masyarakat sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Kota Makassar No. 6 tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan adalah Menyediakan daging segar bagi konsumen dan melindungi konsumen dari daging yang tidak layak konsumsi. Untuk mencapai hasil sesuai dengan peraturan pemerintah pengawasan sangat perlu dilakukan.

Pengawasan yang dilakukan oleh pegawai perusda RPH kota Makassar dilakukan setiap harinya dengan cara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dilakukan seminggu sekali, pengawasan langsung yang dilakukan pada jam 15:00-22:00 merupakan pengawasan hewan sebelum dipotong karena masih banyak ditemuinya hewan sakit yang lolos potong, hewan diperiksa apakah layak potong atau tidak, bagaimana kesehatan hewan. pengawasan kesehatan hewan ini

dilakukan oleh dokter yang berstatus pegawai diperusda RPH kota Makassar.

Sebagaimana yang dikatakan direktur umum perusda RPH Kota Makassar

“...kita melakukan pengawasan hewan sebelum dipotong itu dimulai pada jam 15:00 disini hewan betul-betul diperiksa apakah layak potong untuk dikonsumsi masyarakat atau tidak, proses pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter yang bekerja pada perusda RPH kota Makassar” (wawancara informan T pada 2 juli 2018)

Berdasarkan wawancara tersebut pengawasan tidak hanya dilakukan saat hewan sebelum dipotong karena masih terdapatnya hewan sakit lolos potong akan tetapi juga dilakukan saat hewan akan dipotong pada pukul 02:00-06:00. Pengawasan ini guna menjamin pemotongan hewan sesuai dengan standar persepsi hewan yaitu direbahkan baru disembelih. Sebagaimana yang dikatakan direktur operasional perusda RPH Kota Makassar

“saya sebagai yang ditunjuk oleh walikota yang bertugas memanaaj perusahaan ini, untuk pengawasan-pengawasan pada bagian lapangan saya punya pegawai tetapi itupun saya mesti harus melihat langsung, saya kadang tidak yakin mengatakan bahwa itu sesuai syariat islam kalua saya tidak melihat langsung, jadi hamper tiap malam saya itu berada di lokasi RPH untuk melihat secara kasat mata apakah standar pemotongan hewannya sesuai syariat karena hewan itu “ (wawancara informan L pada 29 juni 2018).

Berdasarkan wawancara pada informan perusda RPH Kota Makassar mendapatkan naungan langsung dari walikota untuk melakukan pengawasan-pengawasan hewan di RPH, selaain itu perusda RPH juga mempunyai pegawai yang bertugas pada bagian pengawasan tetapi kadang pimpinan yang turun langsung mengawasi karena standar pemotongan di RPH harus sesuai dengan syariat islam dalam menyembelih direbahkan terlebih dahulu, ini juga dapat menjamin bahwa daging yang dikonsumsi masyarakat itu pemotongannya sudah sesuai dengan syariat islam, Kehiegenisan hewan saat dipotong juga penting

dilakukan pengawasan. Dalam pengawasan tidak langsung yang dilakukan pegawai perusda berbentuk laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada direktur utama. Pengawasan tidak langsung ini berbentuk laporan dalam bentuk tertulis dan lisan. pegawai yang melakukan pengawasan adalah pegawai yang ditempatkan pada bagian badan pengawas.

Dari hasil penelitian melalui wawancara mendalam pada perusahaan daerah RPH kota Makassar memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap proses berjalannya RPH sebagai pusat produksi daging sesulawesi selatan. Pengawasan terhadap hewan sebelum dan sesudah dipotong, kesterilan daging hewan yang telah dipotong, kebersihan RPH, dan pengolahan kotoran hewan, dan cara pemotongan hewan yang sesuai dengan syariat islam. Pengawasan ini juga bertujuan menjamin masyarakat mendapatkan daging yang pasti kehalalan dan kesehatannya terjamin utuh, aman atau biasa disebut dengan (ASUH).

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui gambaran umum pengawasan kinerja pegawai diperusahaan daerah rumah potong hewan kota Makassar didasarkan pada dua teknik pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan secara pribadi yang dilakukan pengawas atau seorang pemimpin dalam suatu organisasi dengan cara memeriksa, meneliti, mengecek sendiri ditempat berlangsungnya pekerjaan. Pengawasan

langsung meliputi Pengawasan langsung meliputi a) inspeksi langsung, b) on the spot observation, c) on the spot report.

a. inspeksi langsung

Teknik Inspeksi langsung yaitu peninjauan secara pribadi, mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. di perusda RPH kota Makassar mempunyai pegawai yang khusus bertugas pada bagian pengawasan dengan Teknik inspeksi langsung ditambah satu orang dokter, pegawai yang bertugas ini melakukan pengawasan terus menerus setiap hari dimulai dari beroperasinya proses pemeriksaan hewan sampai proses pemotongannya selesai, selain dari pegawai yang ditugaskan pada bagian pengawasan terdapat satu dokter untuk melakukan pemeriksaan sebelum hewan akan dipotong.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan direktur operasional perusda RPH Kota Makassar yang mengatakan

“...untuk bagian pengawasan kita punya beberapa pegawai yang bertugas mengawasi hewan yang akan dipotong di RPH dari mulainya RPH beroperasi sampai berakhir yang dimulai sekitar pukul 22:00-06:00 dan itu juga terkadang saya turun langsung mengawasi apakah aktivitas pemotongan berjalan dengan baik dan lancar sehingga daging yang dikonsumsi masyarakat terjamin kualitasnya karena masih banyak sekali hewan-hewan sakit yang lolos potong.” (wawancara informan L pada 2 juli 2018)

Berdasarkan pada wawancara dengan informan dalam menjalankan tanggung jawabnya melakukan pengawasan terhadap proses produksi daging yang terjadi di RPH, perusda RPH kota Makassar mempunyai pegawai yang khusus berada dibagian pengawasan, pegawai yang bertugas ini melakukan pengawasan

terus menerus setiap hari dimulai dari beroperasinya proses pemeriksaan hewan sampai proses pemotongannya selesai. Hal ini dikarenakan masih banyak hewan sakit yang lolos potong ini berdampak merugikan masyarakat karena mengkonsumsi daging yang tidak sehat dan segar. Berikut dapat dilihat pegawai-pegawai yang bertugas pada bagian pengawasan di perusda RPH

Tabel 4.5 badan pengawasan diperusda RPH kota Makassar

Badan pengawas	Jabatan
Syahrudin ridwan, SS	ketua
Drs. Hakamaruddin	sekertaris
Dokter	dokter
Drs. Syahrir	anggota

Sumber: perusda RPH kota Makassar 2017

Berbeda dengan yang dikatakan direktur operasional perusda RPH Kota Makassar tanggapan salah satu tukang jagal pada RPH yang berstatus sebagai karyawan tenaga kontrak mengatakan

“Bagaimana tidak terjadi banyak masalah pegawai perusda RPH kota Makassar memang tidak pernah datang melakukan pengawasan, mereka tidak pernah memperhatikan apakah RPH sudah butuh perbaikan atau tidak” (wawancara informan B pada 2 juli 2018).

Berdasarkan pada wawancara tersebut pegawai perusda RPH kota Makassar tidak pernah melakukan pengawasan dengan Teknik inspeksi langsung terhadap proses produksi daging yang terjadi di RPH, mereka datang keperusda hanya absen lalu pulang, para pegawai tidak pernah mengawasi mulai dari hewan datang ke RPH sampai kemudian dipotong. Padahal pengawasan terpenting yang harus dilakukan pegawai perusda RPH kota Makassar yaitu terhadap hewan yang sudah

lama mati tetapi masih lolos potong dan hewan sakit yang juga lolos potong. ini berdampak merugikan masyarakat karena tidak lagi mendapat daging yang segar dan layak untuk dikonsumsi. Padahal pada perusda RPH mempunyai pegawai yang khusus berada dibagian pengawasan. Hal lain juga diungkapkan pegawai perusda RPH Kota Makassar pada seksi pemotongan hewan yang mengatakan

“daging yang baik itu juga tergantung dari cara potongnya, ada beberapa indikator yang menjadi persyaratan bagaimana cara-cara pemotongan ternak itu. Selain dari syarat cara-cara potong daging yang baik untuk dikonsumsi itu adalah daging segar dari hewan sehat bukan hewan yang sudah mati tetapi masih saja dipotong” (wawancara informan S pada 2 juli 2018).

Berdasarkan pada pernyataan tersebut daging yang segar tergantung dari cara potongnya. Pengawasan juga dilakukan pada saat pemotongan ternak yang dilakukan di RPH karena daging yang baik juga tergantung dari cara pemotongannya, daging yang sehat juga ditandai oleh hewan yang masih hidup dan sehat lalu dipotong ini akan menghasilkan daging yang segar sebagaimana yang banyak dijumpai dipasaran masih banyak ditemui daging celeng atau daging hewan yang telah mati tetapi masih dipotong. terdapat beberapa indikator pemotongan ternak dan persyaratan untuk memperoleh hasil pemotongan ternak yang baik yang dijelaskan oleh salah satu informan di perusda RPH Kota Makassar yaitu:

- a. Proses penyembelihan
- b. Proses pengulitan
- c. Proses pemisahan bagian-bagian daging
- d. Penimbangan.

Pengawasan yang rutin dilakukan pegawai perusda RPH kota Makassar juga pada:

- a. Pemeriksaan ante-moterm
- b. Penimbangan dan
- c. Jenis kelamin.

Seperti yang dikatakan ketua badan pengawas pada perusda RPH Kota Makassar

“yang paling diperhatikan juga pada saat kami melakukan pengawasan selain pemeriksaan ante-moterm, dan penimbangan kami juga berfokus pada pemeriksaan sapi betina yang akan dipotong, terkadang sapi betina yang dipotong itu masih produktif sedangkan pihak perusda RPH melarang pemotongan sapi betina yang masih produktif” (wawancara informan SR pada 2 juli 2018)

Berdasarkan pada pernyataan diatas pengawasan yang rutin dilakukan pada RPH juga berfokus pada pemeriksaan ante-moterm, penimbangan, dan sapi betina produktif. Hal ini karena banyak terdapat di RPH sapi betina produktif yang lolos potong padahal ini merupakan salah satu larangan hewan yang tidak boleh dipotong. Dapat dilihat pada tabel berikut selain pada sapi jantan ada sapi betina juga yang dipotong.

Tabel 4.6 hewan yang dipotong di RPH kota Makassar

No.	Ternak	Tahun	
		2016	2017
1.	Sapi	16.157	19.733
	Jantan	9.210	10.525
	Betina	6.947	9.248
2.	Kerbau	922	1.471
	Jantan	402	606
	Betina	520	818
3.	Rata-rata/bulan	1.423	1.765
4.	Rata-rata/hari	47	58
5.	Total	17.079	21.190

Sumber: perusda RPH kota Makassar 2017

Berdasarkan informasi yang didapat sangat banyak hewan betina yang dipotong, dan diantara sekian banyak hewan betina yang dipotong masih terdapat hewan betina produktif yang dipotong, hal ini bertentangan dengan aturan di perusda RPH Kota Makassar yang melarang hewan betina produktif untuk dipotong. Pihak perusda seharusnya lebih memperketat lagi pengawasannya terhadap hewan betina produktif yang lolos potong. Selain larangan dari hewan betina produktif terdapat persyaratan untuk memperoleh hasil pemotongan ternak yang baik yang ada di perusda RPH Kota Makassar.

Persyaratan untuk memperoleh hasil pemotongan ternak yang baik yang ada di perusda RPH kota Makassar yaitu:

- a. Ternak tidak boleh mengalami stress
 - b. Harus secepat dan sesempurna mungkin dalam penyembelihan dan pengeluaran darah
 - c. Kerusakan pada karkas harus minimal
 - d. Ternak tidak boleh diperlakukan secara kasar
 - e. Harus higienis cara pemotongannya
 - f. Ekonomis
 - g. Aman bagi pekerja abatoar.
2. on the spot observation,

Pengawasan On the spot observation merupakan pengawasan langsung di tempat pengamatan untuk melihat sendiri bagaimana cara petugas operasional dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan tugasnya. Pada perusda RPH kota Makassar pengawasan dengan cara on the spot observation dilakukan oleh ketiga direktur perusda RPH kota Makassar yaitu direktur utama, direktur umum, dan direktur operasional. sebagaimana yang diungkapkan oleh direktur umum perusda RPH Kota Makassar

“untuk pengawasan langsung ditempat pemotongan hewan saya dan kedua direksi RPH yang turun langsung, disana kita mengawasi apakah daging itu higienis karena kan daging segar itu yang tidak terkena air. Kalau terkena air dagingnya dianggap sudah tidak utuh lagi jadi untuk pengawasan ini kami ketiga direksi yang melakukan pengawasannya” (wawancara informan T pada 2 juli 2018).

Berdasarkan wawancara tersebut pengawasan langsung di perusda RPH kota Makassar yang melakukan pengawasan langsung ditempat pengamatan

dilakukan oleh ketiga direksi perusda RPH kota Makassar, ini guna melihat langsung apakah daging higienis atau tidak. Pengawasan juga dilakukan dengan melihat kehadiran pegawai pada saat apel pagi. Sebagaimana yang dikatakan oleh seksi umum dan kepegawaian pada perusda RPH Kota Makassar

“yang melakukan pengawasan disini itu pak dirut, bapak sering melakukan pengawasan saat apel pagi meski tidak dilakukan setiap hari tetapi beliau sering melakukan pengawasan pada saat apel pagi, kadang jika bapak melakukan pengawasan pada saat proses pemotongan di RPH pada dini hari beliau tidak datang melakukan apel pagi dikantor” (wawancara informan R pada 2 juli 2018)

Hal berbeda diungkapkan oleh salah satu pengusaha potong di RPH

“itu para pegawai perusda hanya ingin uang gaji, mereka enak cuma datang tanda tangan absen lalu pulang. Mereka tidak pernah tinggal untuk mengawasi pada saat RPH beroperasi” (wawancara informan AL pada 2 juli 2018).

Berdasarkan pada wawancara tersebut yang melakukan pengawasan pada saat apel pagi yaitu direktur utama perusda RPH Kota Makassar. Pengawasan ini tidak dilakukan tiap hari jika malam harinya direktur utama melakukan pengawasan terhadap proses pemotongan di RPH. Hal berbeda diungkapkan oleh informan AL sama halnya dengan pegawainya ketiga direktur perusda RPH sangat cuek dengan tugasnya. Banyak yang mengeluhkan kinerja ketiga direktur di perusda RPH kota Makassar mereka hanya ingin uang gaji saja mereka sangat jarang melakukan pengawasan.

Adapun bentuk-bentuk pengawasan yang ada pada perusda RPH kota Makassar

- a. Pegawai pada perusda kecuali mendapatkan izin kerja tidak diperbolehkan meninggalkan kantor

- b. Jika pegawai hendak meninggalkan kantor dengan alasan yang mendesak maka diharuskan membuat surat izin dan diserahkan kepada direksi RPH
- c. Dirut pada perusda melakukan pengawasan kesetiap bagian memastikan jika pegawai ada dikantor
- d. Pegawai pada bagian pengawas melakukan pengawasan pada setiap jam kerja RPH mulai beroperasi sampai berakhir, sekitar pukul 22:00-06:00
- e. Sebelum memulai pekerjaan pegawai terlebih dahulu mengisi absensi setiap pagi, dimulai pada pukul 08:00
- f. dan saat jam kerja berakhir karyawan juga diharuskan mengisins absensi, pada pukul 14:00.

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut pengawasan yang dilakukan oleh Ketiga direktur RPH tidak berjalan dengan maksimal. Ketiga direktur perusda RPH Kota Makassar hanya datang mengawasi jika mendengar berita bahwa pihak dinas peternakan akan melakukan sidak terhadap hewan yang akan dipotong dan jika datang pihak yang mengatasnamakan LSM mendemo. Selain mempunyai tanggung jawab terhadap pengawasan secara on the spot observation ketiga direktur pada perusda RPH kota Makassar juga bertanggung jawab terhadap ketersediaannya sarana dan prasarana yang wajib RPH miliki seperti instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), tempat peristirahatan hewan setelah dipotong, dan kebersihan RPH.

3. on the spot report

Pengawasan on the spot report merupakan pengawasan pada laporan yang diberikan oleh bawahan secara langsung atas hasil pekerjaannya. Pada perusda RPH kota Makassar pengawasan bawahan terhadap atasan sangat jarang terjadi hal ini karena antara pimpinan dan bawahan sama-sama malas perusahaan. Antara pimpinan dan bawahan hanya datang ke kantor untuk absen, antar bawahan dan pimpinan sama-sama mengejar absen yang dijadikan formalitas saja demi kelancaran cairnya gaji dan jika diperlukan dikemudian hari. Pimpinan sama sekali tidak memberikan contoh yang baik terhadap bawahan dengan malasnya datang perusahaan dan malasnya mengawasi proses pemotongan hewan yang terjadi di RPH akibatnya bawahan juga ikut ikutan malas ke kantor, pimpinan sama sekali tidak memberi teguran ataupun sanksi jika bawahan malas ke kantor dan tidak menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Antara pimpinan dan bawahan sama-sama cuek dan tidak peduli pada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Seperti penjelasan oleh salah satu pengusaha potong RPH yang memberikan tanggapan terhadap kinerja perusda RPH kota Makassar mengungkapkan bahwa

“...banyak yang mengeluhkan kinerja pegawai di perusda RPH itu, mereka sangat jarang datang mengawasi, bagaimana mau mengawasi jalannya program-program yang mereka buat kalau ke RPH saja malas, contoh yang paling perlu diperhatikan sekarang atapnya sudah banyak yang bocor, RPH juga tidak punya IPAL, IPAL itu instalasi pengelolaan air limbah. Hewan-hewan yang masuk juga tidak pernah diawasi apakah hewan itu lolos potong atau tidak, apa hewan ini sakit, apa hewan ini betina produktif...”
(wawancara informan AL pada 2 juli 2018)

Berdasarkan pada wawancara tersebut sangat banyak yang mengeluhkan pengawasan kinerja perusda RPH Kota Makassar, untuk datang ke RPH mengawasi jalannya proses pemotongan hewan sangat jarang dilakukan mereka sangat malas, RPH juga tidak memiliki saluran pengelolaan air limbah dan hewan-hewan yang masuk di RPH juga tidak pernah diawasi apakah sakit atau sehat ini yang mengakibatkan banyak hewan sakit yang lolos potong dan hewan-hewan betina produktif banyak yang lolos potong. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya pengawasan yaitu segala aktivitas dalam bertugas yang dilakukan pegawai dapat diketahui, apakah berjalan sesuai dengan prosedur atau tidak. Dengan adanya pengawasan kedisiplinan pegawai dalam bekerja dapat diketahui, dapat dilihat manakah pegawai yang disiplin dan mana yang kurang disiplin, sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai.

Adapun peranan pengawasan pada perusda RPH kota Makassar dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai yaitu:

- a. Menjamin dan mengusahakan pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan apakah sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Sebelum melaksanakan sebuah kegiatan setiap perusahaan atau organisasi membuat perencanaan terlebih dahulu. Tujuannya rencana tersebut apat menjadi pedoman dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam suatu organisasi suatu kegiatan tidak akan memiliki tujuan dan sasaran tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu. Tanpa perencanaan suatu kegiatan tidak memiliki pedoman bagi yang menjalankannya.

b. Mencegah terjadinya penyimpangan

Ketidaksesuaian suatu pekerjaan kadang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Diperlukan suatu tindakan untuk mengetahui terjadinya penyimpangan, tindakan tersebut yaitu dilakukannya pengawasan. Dengan pengawasan pimpinan dapat mencegah dan mengetahui jika terdapat penyimpangan dalam pekerjaan.

c. Memperbaiki penyimpangan atau kesalahan yang terjadi

kesalahan dalam suatu kegiatan biasa terjadi dalam setiap pelaksanaan suatu pekerjaan baik kesalahan kecil maupun kesalahan besar apabila tidak ditangani dengan baik akan mengganggu tercapainya tujuan dalam pekerjaan. Kesalahan bisa diakibatkan factor manusia dan non manusia. Oleh karena itu pengawasan sangat diperlukan agar tiap pelaksanaan kegiatan pimpinan dapat memonitor dengan baik agar kegiatan tetap pada alurnya.

Sebagaimana diungkapkan ketua badan pengawasan perusda RPH Kota Makassar mengatakan

“pengawasan disini manfaatnya untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan-penyimpangan. Kadang dalam suatu kegiatan kan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terjadi kesalahan-kesalahan kecil disini manfaatnya adanya pengawasan yang dilakukan direktur umum perusda untuk mencegah terjadinya suatu penyimpangan dan jika ada suatu penyimpangan yang terjadi kami direktur RPH dapat dengan cepat memperbaikinya agar penyimpangan tersebut tidak terjadi lagi” (wawancara informan SR pada 29 juni 2018)

Berdasarkan wawancara tersebut prngawasan pada RPH berguna agar pelaksanaan pekerjaan maupun tugas-tugas yang dilakukan oleh pegawai dapat

diketahui sudah sejauh mana apakah berjalan lancar atau terdapat beberapa penyimpangan yang perlu diperbaiki. dengan pengawasan yang dilakukan pimpinan perusda RPH Kota Makassar dapat mengevaluasi terdapatnya hambatan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja pegawai. Pengawasan juga sangat membantu pimpinan apakah dalam menjalankan tugasnya pegawai terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga dapat diperbaiki dan mencegah terjadinya penyimpangan dimasa mendatang

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Pengawasan terhadap pegawai atau bawahan sangat penting dilakukan. Pengawasan bukan hanya dijalankan sekedar pencapaian kerja suatu pegawai dengan apa yang telah direncanakan tetapi sebuah proses pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai keberhasilan pekerjaan.

1. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang secara tidak langsung dilakukan oleh pimpinan dalam suatu perusahaan dengan cara mempelajari laporan-laporan yang diterima dari bawahan baik lisan maupun tulisan, Situmorang dan Juhir (dalam Dessy Nindya Ningsih: 2017). Pengawasan tidak langsung yang biasanya dilakukan diperusda RPH Kota Makassar yaitu dengan cara lisan dan tulisan, secara lisan dapat berbentuk berkala, mendadak dan rutin dilakukan. Dan secara tulisan berbentuk laporan-laporan, dan juga absensi pegawai. Dalam pengawasan tidak langsung yang dilakukan pegawai perusda RPH Kota Makassar Pengawasan tidak langsung yang berbentuk tulisan

Pengawasan dalam bentuk tulisan diperusda RPH Kota Makassar ini berbentuk laporan dalam bentuk tertulis yang disampaikan oleh bawahan kepada direktur utama. Laporan itu terdiri dari absensi pegawai. tiap harinya pegawai mengisi absen dan jika ada pegawai yang hendak meninggalkan kantor maka pegawai tersebut diwajibkan untuk meminta izin dari pimpinan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh direktur operasional perusda RPH Kota Makassar

“untuk pengawasan secara tidak langsung saya mendapat laporan dari bawahan, selain itu dengan melihat absensi rutin tiap hari, pengawasan tidak langsung ini sering saya lakukan karena saya kadang tidak punya banyak waktu dan tidak bisa 24 jam mengawasi pegawai yang ada dikantor maupun pegawai yang bertugas dibagian lapangan saat RPH beroperasi jadi yah saya melakukan pengawasan kadang dari melihat absensi” (wawancara informan L pada tanggal 29 juni 2018)

Berbeda dengan yang diungkapkan tukang jagal diRPH

“pimpinan di RPH sangat jarang masuk kantor, itupun datang cuma absen lalu pulang, semenjak pergantian dirut RPH memang semakin menurun padahal ini RPH pusat penghasil daging se Sulawesi selatan. Harusnya pegawai-pegawai lebih meningkatkan kinerjanya jangan cuma mau gaji saja” (wawancara informan B pada 2 juli 2018)

Hal serupa dikatakan oleh salah satu pengusaha potong RPH

“Untuk pengawasan pihak perusda tidak pernah melakukan pengawasan, sudah banyak yang mengeluhkan kinerjanya diduga dari hasil lelang jabatan untuk direksinya itu ada kecurangan makanya orang yang tidak tau mengelola RPH yang malah terpilih” (wawancara informan AL pada 2 juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas untuk pengawasan tidak langsung pimpinan yang melakukan pengawasan tidak setiap hari tetapi sering dikarenakan pimpinan tidak bisa 24 jam mengawasi. Tetapi hal lain didapatkan berdasarkan pernyataan informan B kenyataannya pegawai pada perusda RPH Kota Makassar

hanya datang dikantor untuk absensi setelah selesai absensi maka pegawai tersebut sudah pulang. absensi hanya digunakan sebagai formalitas agar laporan yang sampai pada pimpinan bersifat positif, para pegawai di perusda RPH Kota Makassar sangat jarang masuk kantor mereka hanya ingin uang gaji saja sedangkan untuk melakukan pengawasan di rumah potong hewan sangat jarang dilakukan. Pada perusda RPH Kota Makassar juga tidak pernah melakukan pengawasan secara mendadak atau dengan istilah sidak. Pegawai perusda RPH Kota Makassar tidak peduli mengenai hewan-hewan yang akan dipotong di RPH mulai dari kesehatannya, di perusda RPH Kota Makassar memiliki satu orang dokter yang bertugas memeriksa hewan sebelum dipotong apakah hewan lolos potong atau tidak. Pengawasan terhadap jenis kelamin hewan juga merupakan hal penting dilakukan dan merupakan salah satu peraturan pada perusda RPH Kota Makassar yang melarang hewan betina yang masih produktif untuk dipotong, maupun kehiegenisan hewan yang telah dipotong. Pegawai di perusda RPH Kota Makassar tidak pernah melakukan pengawasan secara mendadak pada RPH apakah cara potong hewan sudah sesuai dengan syariat islam atau belum.

Pengawasan tidak langsung dalam bentuk lisan

Pengawasan tidak langsung secara lisan yaitu pengawasan yang dilakukan pimpinan pada perusda RPH kota Makassar dalam bentuk pengawasan dari jarak jauh yang seringkali berbentuk Pengawasan secara mendadak. Pengawasan secara mendadak merupakan pengawasan yang biasanya dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dan dilakukan secara mendadak atau yang biasa

disebut dengan sidak. Seperti yang diungkapkan pegawai bagian seksi umum dan kepegawaian diperusda RPH Kota Makassar

“pengawasan yang biasa dilakukan pimpinan kebanyakan juga pengawasan tidak langsung karena terkadang dia sibuk mengurus pengawasan lapangan jadi tidak sempat untuk ke kantor mengawasi pegawai begitupun sebaliknya jika pimpinan sibuk di kantor maka tidak sempat datang mengawasi di RPH, kadang beliau mengadakan rapat dadakan dan meminta laporan-laporan mingguan dan memeriksa absensi pegawai” (wawancara informan R pada 29 juni 2018).

Berdasarkan pada wawancara tersebut pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan pimpinan karena terkadang dia sibuk mengurus pegawai yang bertugas pada bagian pengawasan dilapangan jadi tidak sempat ke kantor mengawasi kinerja pegawainya. Pimpinan juga terkadang mengadakan rapat dadakan dan meminta laporan-laporan mingguan dan memeriksa absensi harian pegawai. Selain pengawasan secara mendadak, Pengawasan secara berkala juga biasa dilakukan pada perusda RPH kota Makassar, seperti pada saat rapat yang biasa dilakukan pada tiap minggu, atau satu kali dalam sebulan. Pengawasan ini guna untuk mengawasi kinerja pegawai apakah sudah berjalan dengan maksimal, memaksimalkan kinerja pegawai juga bukan hanya dilakukan melalui proses pengawasan juga dengan memberikan motivasi-motivasi kerja terhadap pegawai agar kinerjanya lebih baik.

Dalam meningkatkan kinerja pegawai melakukan pengawasan agar tetap baik pihak perusda RPH memberikan motivasi-motivasi, adapun bentuk motivasi yang diberikan:

- a. dengan pencapaian kinerja terbaik pertahunnya, pihak perusahaan memberikan apresiasi kepada pegawainya dan mendapatkan penghargaan
- b. pihak perusahaan membayar gaji para pegawai dengan tepat waktu
- c. perusahaan menyediakan kotak kritik dan saran untuk menyuarakan perusahaan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan tidak langsung yang dilakukan pimpinan baik lisan maupun tulisan menggunakan tiga cara yaitu berkala, mendadak dan melalui absensi harian pegawai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pengawasan kinerja pegawai di perusahaan daerah rumah potong hewan kota Makassar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung di perusahaan daerah rumah potong hewan kota Makassar meliputi teknik Inspeksi langsung, On the spot observation, dan Pengawasan on the spot report. Pengawasan langsung di perusahaan daerah rumah potong hewan kota Makassar masih dianggap kurang dan belum maksimal menyangkut pengawasan terhadap pemeriksaan ante-mortem, penimbangan, jenis kelamin, pengawasan yang terus menerus setiap hari dimulai dari beroperasinya proses pemeriksaan hewan sampai proses pemotongannya selesai. Selain itu pengawasan saat hewan akan dipotong apakah telah sesuai dengan syariat islam atau tidak.
2. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh perusahaan daerah rumah potong hewan kota Makassar dimana pengawasan yang rutin dilakukan melalui absensi, Pengawasan secara mendadak dan Pengawasan secara berkala. Pengawasan ini belum maksimal dan berjalan lancar karena pegawai sangat jarang ke kantor dan jarang sekali melakukan pengawasan.

B. Saran

1. Dengan adanya stigma bahwa diperusahaan daerah rumah potong hewan kota Makassar pihak perusahaan tidak pernah melakukan pengawasan terhadap hewan yang masuk di RPH mulai dari proses pemeriksaan hewan sampai hewan selesai dipotong, maka seharusnya pihak perusda RPH lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan.
2. Pihak perusahaan daerah rumah potong hewan kota Makassar harus lebih bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan terkhusus pada pengasan tidak langsung dalam membuat laporan-laporan agar tugas dan kepercayaan yang dibebankan oleh walikota Makassar dalam mengelola RPH dapat bertahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. 2009. *Dasar-dasar manajemen*. Bandung : Alfabeta
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Creswell, John w. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka pelajar
- Chaterina Melina Taurisa, Ratnawati Intan. 2012. *Analisis pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional dalam meningkatkan kinerja karyawan (studi pada PT. Sido Muncul Kaligawe Semarang)*. Jurnal Manajemen Universitas Diponegoro. (172). P 1412-3126
- Darnisa, Muhlis Madani, Abdul Mahsyar. 2016. Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, vol.2 No.2
- Dessy Nindya Ningsih. 2017. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pesawaran*. Universitas Lampung
- Fahmi, Irham.2010. *Manajemen Kinerja*. Bandung: Alfabeta
- Hetty Fitriah Rahmawati. 2007. *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai di Kantor Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Karanganyar*. Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Muhammad Habib Siregar. 2017. *Pengaruh Pengawasan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PDAM Tirtanadi Pusat Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- Nurjaman. *Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Kerja Studi Kasus di Inspektorat Kabupaten Indramayu*. Universitas Wiralodra. (2). P 1693-7945
- Peraturan Pemerintah Kota Makassar No. 6 tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan
peraturan Daerah Kota Makassar No.3 Tahun 1984 tentang rumah potong hewan (RPH)
- Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2000 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Makassar (Lembar Daerah Kota Makassar No, 3 Tahun 2000 Seri D

Peraturan Pemerintah Kota Makassar No. 6 tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan

Ridjal, Syamsul. 2010. *Teori Motivasi dan Kinerja Karyawan*. Makassar: Fahmi Pustaka

Satriadi. 2016. *Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada SD Negeri Binaan Tanjung Pinang*. Jurnal Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjung Pinang. (290). P 288-295

Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara

Siagian, Sondang P. 1992. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara

Siagian, Sondang P. 2006. *Manajemen Internasional*. Jakarta: Bumi Aksara

SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 2006 tentang

Ummi Masitahsari. 2015. *Analisis Kinerja Pegawai Dipuskesmas Jongaya Makassar*. Jurnal Administrasi Negara Universitas Hasanuddin. (8). P 1992-2015

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Mandar Maju

Wijayanti, Irine Diana Sari. 2008. *Manajemen*. Jogjakarta: Mitra Cendikia

Zulkifli Asdar. 2014. *Analisis Proses Pengelolaan Pemotongan Sapi dan Kerbau di Rumah Potong Hewan Tamangapa Kecamatan Manggala Makassar*. Universitas Hasanuddin

LAMPIRAN

RPH KOTA MAKASSAR





Perusahaan daerah Rumah potong hewan Kota Makassar



Struktur organisasi dan tata cara kerja perusda RPH kota Makassar



Pedoman wawancara

a. Direktur operasional perusahaan daerah rumah potong hewan Kota Makassar
bapak Lutfi Noegraha, S.Si

1. Siapakah yang melakukan pengawasan pada RPH
2. Bagaimana pengawasan pada RPH selama ini?
3. Apa saja bentuk-bentuk pengawasan?
4. Kapan pengawasan langsung dilakukan?
5. Kapan pengawasan tidak langsung dilakukan?
6. Adakah masalah atau kendala saat proses pengawasn berlangsung?
7. Bagaimana pengawasan langsung pegawai perusda RPH Kota Makassar?
8. Bagaimana pengawasan tidak langsung pegawai perusda RPH Kota Makassar?
9. Apakah para pegawai pada perusda sudah ditempatkan sesuai dngan kemampuannya?
10. Bagaimana pengawasan langsung perusda RPH Kota Makassar dalam meningkatkan produksi daging pada RPH Kota Makassar?
11. Pendapatan yang dihasilkan RPH apakah masuk juga ke perusda RPH?

b. Direktur umum perusahaan daerah rumah potong hewan Kota Makassar

Tamrin Mensa, S.T, MM

1. Bagaimana bentuk-bentuk pengawasan langsung pegawai perusda RPH Kota Makassar?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pengawasan tidak langsung pegawai perusda RPH Kota Makassar?
3. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di RPH? Apakah sdah memenuhi standar?
4. Apa kendala dalam melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung?
5. Kapan pengawasan langsung mulai dilakukan?
6. Kapan pengawasan tidak langsung dilakukan?
7. Dalam melakukan pengawasan langsung apakah kendala yang dirasakan?

c. Tukang jagal RPH bapak Bate

1. Bagaimana pengawasan langsung yang dilakukan pegawai perusda RPH Kota Makassar?
2. Bagaimana pengawasan tidak langsung yang dilakukan pegawai perusda RPH Kota Makassar?
3. Bagaimana tata cara pemotongan hewan di RPH

d. Seksi pemotongan hewan perusahaan daerah rumah potong hewan Kota

Makassar Drs. Syahrir

1. Bagaimana standar pemotongan hewan di perusda RPH Kota Makassar?
2. Bagaimana agar daging yang dihasilkan aman, sehat, utuh, dan halal?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap kinerja pegawainya?
4. Siapa yang melakukan pengawasan pada RPH
5. Apa manfaat yang diperoleh dengan adanya pengawasan langsung maupun tidak langsung?

e. Seksi umum dan kepegawaian perusahaan daerah rumah potong hewan Kota

Makassar Rusmawati

1. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengawasan?
2. Siapakah pimpinan yang biasa melakukan pengawasan langsung ada RPH?
3. Bagaimana bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan pimpinan terhadap pegawai?

f. Pengusaha potong rumah potong hewan Kota Makassar Ahmad dg lala

1. Bagaimana pengawasan kinerja perusda RPH Kota Makassar?
2. Bagaimana bentuk perhatian pegawai perusda RPH Kota Makassar terhadap RPH?



RIWAYAT HIDUP

Nurmayanti, lahir pada tanggal 05 Oktober 1996 di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Abdul Kadir dan Nurhaedah. Memasuki jenjang pendidikan formal di SD Inpres Tamangapa pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 17 Makassar dan tamat pada tahun 2011. Kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 10 Makassar dan tamat pada tahun 2014. Penulis melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2014 dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pada program Strata Satu (S1).